LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

Nomor : 800.1.5/295/1/DISHUB/2026
Tanggal : 31 Januari 2026

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, sekaligus sebagai wujud komitmen terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi di bidang perhubungan. Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tidak terlepas dari arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, dengan visi *"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"*.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuh misi pembangunan daerah, yaitu:

(1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan beradab;

(2) Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

(3) Mewujudkan keterkaitan *nexus* ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya menghadapi perubahan iklim;

(4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;

(5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya, didukung pengembangan olahraga dan pariwisata;

(6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas; dan

(7) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, kearifan lokal, serta nilai-nilai kebudayaan.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tersebut, dengan tujuan perangkat daerah yaitu *"Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas"*. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis, meliputi:

(1) Meningkatnya keselamatan transportasi provinsi;

(2) Meningkatnya layanan transportasi; dan

(3) Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, serta memuat hasil evaluasi atas capaian Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. LAKIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, pengendalian dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LAKIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 10 Januari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MUSNI WIJAYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 3

1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA (strategic Issued). 7

1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA 10

1.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 20

1.6 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH 21

1.7 LANDASAN HUKUM 30

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI 32

2.2 RENCANA KINERJA 32

2.3 PERJANJIAN KINERJA 44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 46

3.2 HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 46

3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN 63

3.4 REALISASI ANGGARAN 122

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN 129

4.2 SARAN 129

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat 10

1.2 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sekretariat 10

1.3 Jumlah Pegawai Bidang Lalu Lintas 12

1.4 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas Jalan 12

1.5 Jumlah Pegawai Bidang Angkutan Jalan 13

1.6 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Angkutan Jalan 13

1.7 Jumlah Pegawai Bidang Pelayaran.....14

1.8 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Pelayaran 14

1.9 Jumlah Pegawai Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan.....15

1.10 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan.....15

1.11 Jumlah Pegawai UPTD Penyelenggaraan ASDP dan Laut 16

1.12 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD PASDPL 16

1.13 Jumlah Pegawai UPTD Pengelolaan Terminal.....17

1.14 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD Pengelolaan Terminal.....17

1.15 Jumlah Pegawai UPTD Pelabuhan Tanjung Api-Api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya.....18

1.16 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD Pelabuhan TAA dan Stasiun Kertalaya 18

1.17 Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Dishub Prov. Sumsel 19

1.18 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD 22

1.19 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pelayanan PD.24

2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan 32

2.2 Program Kegiatan Tahun 2025 Setelah Perubahan.....33

2.3 Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan 44

2.4 Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan 45

3.1 Skala Penilaian Realisasi Kinerja.....46
3.2 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transfortasi Provinsi Tahun 2025.....49
3.3 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kereta Api Tahun 2025 50
3.4 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kereta Api 50
3.5 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2025.....52
3.6 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kapal Laut.....52
3.7 Capaian Kinerja Load Faktor Penumoang Bus AKDP Tahun 2025.....54
3.8 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Bus AKDP.....54
3.9 Capaian Kinerja Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2025 55
3.10 Target dan Realisasi Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2025.....55
3.11 V/C Rasio Jalan Provinsi Tahun 2025.....62
3.12 Target dan Realisasi V/C Rasio Jalan Provinsi Tahun 2025.....62
3.13 Capaian Kinerja Tahun 2025 TW IV.....63
3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 66
3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021-2022 68
3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2023-2024 70
3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja2025.....73
3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Rencanan Strategis 74
3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Dishub Prov. Sumsel terhadap
Kementerian Perhubungan.....76
3.20 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan dan Solusi 78
3.21 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan.....80
3.31 Capaian Anggaran dan Program dan Kegiatan 89
3.32 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....100
3.33 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....101

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan..... 3

1.2 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah 23

1.3 Keterhubungan Renstra dengan RPJMD.....23

3.7 Load Factor Penumpang Kereta Api dan LRT Tahun 2025 50

3.8 Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2025 52

3.9 Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2025 53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani transportasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2025 yaitu Untuk dijadikan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2025 yaitu Sebagai dasar monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan.

Strategi dan arah kebijakan transportasi Sumatera Selatan pada masa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan;
2. Mengoptimalkan fungsi simpul transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara);
3. Digitalisasi dan Peningkatan layanan public transportasi;
4. Meningkatkan fungsi pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
5. Mengembangkan sistem angkutan yang berbasis angkutan massal.
6. Pengendalian V/C Ratio dan manajemen lalu lintas
7. Penanganan titik rawan kecelakaan dan keselamatan
8. Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi
9. Mendorong penyediaan angkutan umum pada Daerah yang belum terlayani
10. Optimalisasi Penggunaan Angkutan Umum Darat
11. Optimalisasi Penggunaan Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan
12. Mendorong percepatan jalan khusus sesuai aturan dan percepatan operasional alur sungai musi 24 jam
13. Optimalisasi transportasi multimoda
14. Mendukung Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat
15. Optimalisasi Pengawasan Angkutan Barang

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan didukung oleh struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Bidang-Bidang Teknis, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

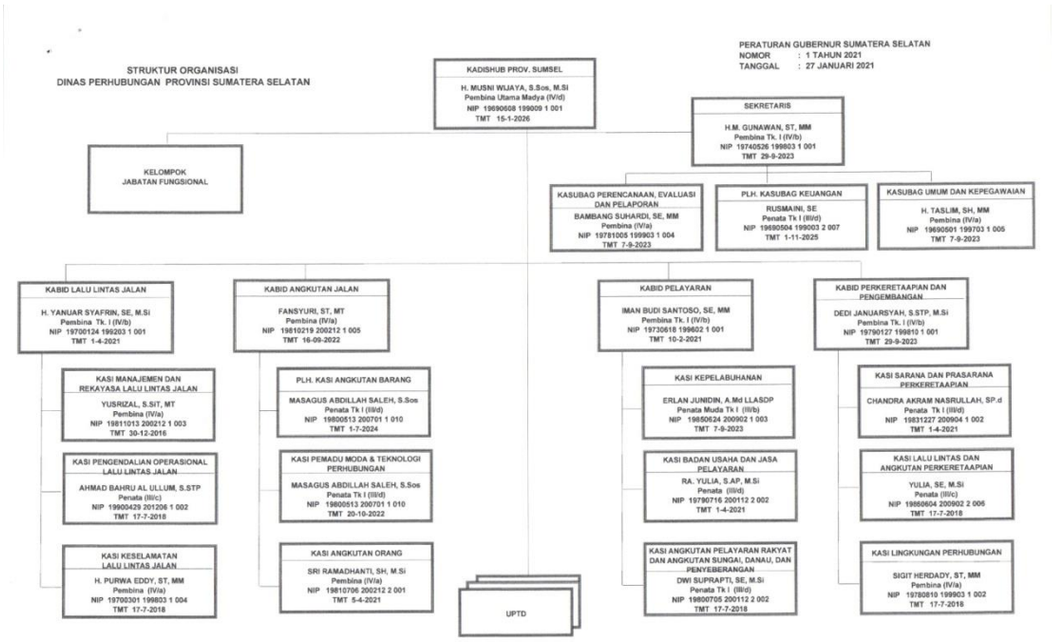

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Urataian Tugas, dan Fungsi UPTD di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;
b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
e. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas;
g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Sekretaris

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan, informasi dan teknologi, urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. **Subbagian Umum dan Kepegawaian;**
2. **Subbagian Keuangan;**
3. **Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.**

1.2.3 Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. **Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;**
2. **Seksi Pengendalian Operasional Lalu lintas Jalan;**
3. **Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan**

1.2.4 Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana Terminal, Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Bidang Angkutan Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. **Seksi Angkutan Orang**
2. **Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan**
3. **Seksi Angkutan Barang**

1.2.5 Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Bidang Pelayaran membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. **Seksi Kepelabuhanan**
2. **Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran**
3. **Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan**

1.2.6 Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. **Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian**
2. **Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian**
3. **Seksi Lingkungan Perhubungan**

1.2.7 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut

Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut terdiri dari :

1. **Kepala UPTD**

   Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut.

2. **Sub Bagian Tata Usaha**
3. **Seksi Operasional**
4. **Seksi Sarana dan Prasarana**

1.2.8 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya terdiri dari :

1. **Kepala UPTD**

   Mempunyai tugas melaksanakan penyelengaraan pelabuhan penyeberangan tanjung api-api dan kereta api indralaya.

2. **Sub Bagian Tata Usaha**
3. **Seksi Operasional Penyeberangan Tanjung Api-api**
4. **Seksi Operasional KA Indralaya**

1.2.9 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Terminal

Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :

1. **Kepala UPTD**

   Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Terminal.
2. **Sub Bagian Tata Usaha**
3. **Seksi Operasional**
4. **Seksi Sarana dan Prasarana**

1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued)

Aspek strategis keberadaan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi dinamika pembangunan saat ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Sektor transportasi memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang terintegrasi, efektif, dan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai permasalahan utama yang dihadapi, baik internal maupun eksternal.

Permasalahan internal meliputi :

1. Belum optimalnya tata kelola organisasi, keterbatasan dan belum meratanya sumber daya manusia,

2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi,
3. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi,
4. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan,
5. Terbatasnya jangkauan layanan transportasi terutama di wilayah terpencil dan perairan.
6. Pengawasan internal berbasis risiko serta implementasi peta proses bisnis juga belum berjalan optimal.

Sementara itu, permasalahan eksternal antara lain :

1. rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas,
2. belum optimalnya koordinasi antar instansi,
3. peningkatan volume lalu lintas yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur,
4. serta pengaruh kondisi ekonomi dan kebijakan nasional di bidang transportasi.

Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penetapan Permasalahan Utama yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan diantaranya.

1. **Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas**

   Pada Tahun 2024, jumlah kecelakaan lalu lintas di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebanyak 2.577 kejadian dan meningkat pada Tahun 2025 menjadi 3.052 kejadian atau naik sebesar 14,58%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh bertambahnya volume lalu lintas, rendahnya disiplin pengguna jalan, serta kondisi prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar keselamatan. Selain itu, perilaku berkendara berisiko juga menjadi faktor utama. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas, peningkatan pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen lalu lintas.

2. Peningkatan Jaringan Pelayanan Transportasi yang Terintegrasi

Jaringan pelayanan transportasi belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi geografis yang luas menuntut peningkatan konektivitas layanan transportasi. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

3. Peningkatan Pelayanan Simpul Transportasi

Simpul transportasi sebagai titik perpindahan moda memiliki peran penting dalam sistem transportasi. Namun, pelayanan simpul transportasi belum optimal akibat belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan keterbatasan fasilitas.
Upaya yang dilakukan antara lain penyusunan kajian lokasi pelabuhan pengumpan regional serta pengembangan terminal tipe B guna mendukung integrasi antarmoda.

4. Kemacetan Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan

Kemacetan lalu lintas terjadi akibat tingginya volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, sementara pembangunan infrastruktur memerlukan biaya besar.
Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan koordinasi lintas instansi serta penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan provinsi.

5. Peningkatan Kinerja Prasarana Transportasi

Kinerja prasarana transportasi saat ini belum optimal, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan prasarana baru.
Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi pemanfaatan prasarana yang ada serta pengukuran kinerja melalui survei kepuasan masyarakat sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.

1.4 DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan seperti tersebut diatas, maka sumber daya yang dimiliki dapat dikelompokan menjadi :

1.4.1 Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 136 pegawai yang tersebar pada Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPTD dengan komposisi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat

NO	JUMLAH PEGAWAI (68 orang)		JENJANG PENDIDIKAN		KOMPETENSI
	Laki - laki	Perempuan			
1.			S3	-	Diklat Anjab dan ABK
2.	7 orang	1 Orang	S2	8 orang	Diklat AKPK
3.	11 orang	19 orang	S1	30 orang	Diklat Keuangan
4.	4 orang	-	D4	4 orang	Diklat Perencanaan
5.	4 orang	5 orang	D3	9 orang	Diklat PBJ
6.			D2	-	Diklat Manajemen ASN
7.			D1	1 orang	
8.	10 orang	4 orang	SMA	14 orang	
9.	1 orang		SMP	1 orang	
10.	1 orang		SD	1 orang	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Sekretariat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sekretariat

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				
1.	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	2
2.	JF Perencana Ahli Muda	2	0	2
3.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1	1	0

NO	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
4.	JF Arsiparis Terampil	1	1	0
5.	Penelaah Teknis Kebijakan	8	6	2
6.	Penata Layanan Operasional	8	3	5
7.	Pengolah Data dan informasi	4	0	4
8.	Pengadministrasi Perkantoran	4	0	4
Jumlah		30	11	19
Subbag Umum dan Kepegawaian				
1.	JF Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	4	0	4
2.	JF Arsiparis Ahli Pertama	4	0	4
3.	JF Arsiparis Penyelia	4	0	4
4.	JF Arsiparis Mahir	4	0	4
5.	JF Pranata Komputer Mahir	4	1	3
6.	JF Arsiparis Terampil	4	1	3
7.	Penelaah Teknis Kebijakan	6	6	0
8.	Penata Layanan Operasional	9	9	0
9.	Pengolah Data dan informasi	6	4	2
10.	Pengelola Layanan Operasional	4	4	0
11.	Pengadministrasi Perkantoran	6	2	4
12.	Operator Layanan Operasional	5	4	1
13.	Pengelola Umum Operasional	5	5	0
Jumlah		65	36	29
Subbag Keuangan				
1.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
2.	JF Arsiparis Terampil	2	1	1
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	8	6	2
4.	Penata Layanan Operasional	6	4	2
5.	Pengolah Data dan Informasi	6	4	2
6.	Pengelola Layanan Operasional	6	4	2
7.	Pengadministrasi Perkantoran	6	5	1
Jumlah		36	24	12

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Bidang Lalu Lintas

NO	JUMLAH PEGAWAI (80 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki -laki	Perempuan		
1.			S3 -	Diklat PPNS
2.	5 orang	2 orang	S2 7 orang	Diklat Orientasi LLAJ
3.	17 orang	5 orang	S1 22 orang	Diklat JT
4.	9 orang	7 orang	D4 16 orang	Diklat ANDA LALIN
5.	1 orang	-	D3 1 orang	Diklat KA
6.			D2 -	
7.		1 orang	D1 1 Orang	
8.	32 orang	1 orang	SMA 33 orang	
9.			SMP -	
10.			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Lalu Lintas Jalan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Lalu Lintas Jalan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Manajamen Rekayasa Lalu Lintas Jalan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	4	1	3
Jumlah		8	4	4
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan				
1.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	2	1	1
2.	Penelaah Teknis Kebijakan	25	20	5
3.	Penata Layanan Operasional	4	3	1
4.	Pengolah Data dan informasi	4	1	3
5.	Pengelola Layanan Operasional	4	3	1
6	Operator Layanan Operasional	50	38	12
Jumlah		89	66	23
Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	10	6	4
2.	Penata Layanan Operasional	5	3	2
Jumlah		15	9	6

3. Bidang Angkutan Jalan

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Bidang Angkutan Jalan

NO	JUMLAH PEGAWAI (15 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1			S3	-	Diklat PPNS
2	2 orang	2 orang	S2	4 orang	Diklat Orientasi LLASDP
3	3 orang	2 orang	S1	5 orang	Diklat JT
4	3 orang		D4	3 orang	
5			D3	-	
6			D2	-	
7	2 orang	1 orang	SMA	3 orang	
8			SMP	-	
9			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Angkutan Jalan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Angkutan Orang				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		6	3	3
Seksi Angkutan Barang				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	2	0
3.	Operator Layanan Operasional	4	4	0
Jumlah		8	7	1

Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2

4. Bidang Pelayaran

Tabel 1.7 Jumlah Pegawai Bidang Pelayaran

NO	JUMLAH PEGAWAI (15 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat PPNS
	1 orang	4 orang	S2 5 orang	Diklat HILO
	3 orang	3 orang	S1 6 orang	
	1 orang		D4 1 orang	
	1 orang		D3 1 orang	
			D2 -	
	1 orang	1 orang	SMA 2 orang	
			SMP -	
			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Pelayaran sebagai berikut :

Tabel 1.8 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Pelayaran

NO	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Kepelabuhanan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2
Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	3	0
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Operator Layanan Operasional	2	2	0
Jumlah		7	6	1

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	3	2	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		5	3	2

5. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

NO	JUMLAH PEGAWAI (11 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat ANDA LALIN
2	3 orang	1 orang	S2 4 orang	Diklat Audit Keselamatan
3	2 orang	3 orang	S1 5 orang	Diklat Perkeretaapian
4		1 orang	D4 1 orang	Diklat Perlintasan Sebidang
5			D3 -	
6			D2 -	
7	1 orang		SMA 1 orang	
8			SMP -	
9			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Perkeretaapaian dan Pengembangan sebagai berikut:

Tabel 1.10 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perkeretaapian

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
Jumlah		4	2	2
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	1	3
Seksi Lingkungan Perhubungan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
Jumlah		4	2	2

6. UPTD PASDPL

Tabel 1.11 Jumlah Pegawai UPTD Penyelenggaraan ASDP dan Laut

NO	JUMLAH PEGAWAI (21 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat Orientasi LLASDP
	6 orang	2 orang	S2 8 orang	Diklat SAR
	5 orang	1 orang	S1 6 orang	Diklat MOP
	1 orang		D4 1 orang	
	4 orang		D3 4 orang	
			D2 -	
	2 orang		SMA 2 orang	
			SMP -	
			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD PASDPL sebagai berikut :

Tabel 1.12 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD PASDPL

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Pengadministrasi Perkantoran	5	5	0
Jumlah		9	8	1
Seksi Operasional				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	2	1	1
3.	Pengelola Data dan Informasi	2	1	1
Jumlah		8	5	3
Seksi Sarana dan Prasarana				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Pengelola Data dan Informasi	2	1	1
Jumlah		6	4	2

7. UPTD Pengelolaan Terminal

Tabel 1.13 Jumlah Pegawai UPTD Pengelolaan Terminal

NO	JUMLAH PEGAWAI (104 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat Pengujian
2	3 orang	2 orang	S2 5 orang	Diklat Pengelolaan Terminal
3	29 orang	6 orang	S1 35 orang	
4	1 orang		D4 1 orang	
5	5 orang		D3 5 orang	
6			D2 -	
7	54 orang	3 orang	SMA 57 org	
8	1 orang		SMP 1 Org	
9			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pengelolaan Terminal sebagai berikut:

Tabel 1.14 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD Pengelola Terminal

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	2	2
2.	Penata Layanan Operasional	6	5	1
3.	Pengadministrasi Perkantoran	5	4	1
Jumlah		15	11	4
Seksi Operasional				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	14	10	4
2.	Penata Layanan Operasional	6	1	5
3.	Pengadministrasi Perkantoran	20	14	6
4.	Operator Layanan Operasional	20	16	4
Jumlah		60	41	19
Seksi Sarana dan Prasarana				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	4
2.	Penata Layanan Operasional	10	7	3
Jumlah		14	7	7

8. UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

Tabel 1.15 Jumlah Pegawai UPTD Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

NO	JUMLAH PEGAWAI (57 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1			S3 -	Diklat Perkeretaapian
2	2 orang	1 orang	S2 3 orang	Diklat Pengawasan Pelabuhan
3	18 orang	4 orang	S1 22 orang	
4	2 orang		D4 2 orang	
5	4 orang	5 orang	D3 9 orang	
6			D2 -	
7	20 orang	1 orang	SMA 21 orang	
8			SMP -	
9			SD -	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya sebagai berikut:

Tabel 1.16 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Subbag Tata Usaha				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	3	1
2.	Penata Layanan Operasional	5	1	4
3.	Pengelola Layanan Operasional	5	3	2
4.	Operator Layanan Operasional	5	2	3
Jumlah		19	9	10
Seksi Operasional Pelabuhan				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	5	5	0
2.	Operator Layanan Operasional	20	1	19
Jumlah		25	6	19
Seksi Operasional Kereta Api Inderalaya				
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	4
2.	Penata Layanan Operasional	10	4	6

3.	Pengelola Layanan Operasional	10	1	9
4.	Operator Layanan Operasional	50	33	17
Jumlah		74	38	36

1.4.2 Inventaris Tanah Dan Bangunan

Tabel 1.17 Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Nama Barang	Alamat Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
1	Kantor Dinas Perhubungan	Jl. Kpt. A. Rivai No. 51 Palembang	Tanah dan 2 (dua) buah Bangunan Gedung 2 lt Kantor Dinas Perhubungan
2	Rumah Dinas Talang Betutu	Jl. Cempaka Kel. Talang Betutu Palembang	Tanah dan Rumah Dinas No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23, dan Rumah Ibadah Dimanfaatkan
3	Rumah Dinas Pendawa	Jl. pandawa kel 2 ilir Palembang	Tanah dan 11 (sebelas) Bangunan Rumah Dinas
4	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api - Api	Desa Sungsang I Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin	Tanah dan Gedung Kantor, Dermaga, Kantin, Fasilitas perbankan Sumsel Babel Pelabuhan Penyeberang TAA
5	Stasiun Kereta Api UNSRI Inderalaya	Jl. Palembang - Inderalaya	Bangunan Gedung Stasiun dan Gedung Kantor
6	Bangunan Gedung Terminal Type B Jakabaring	Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Palembang	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Jakabaring
7	Bangunan Gedung Terminal Type B Inderalaya	Jl Lintas Sumatera Indralaya KM 33	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Inderalaya
8	Bangunan Gedung Terminal Type B Randik Musi Banyuasin	Jl. Terminal Randik kab. Muba	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD serta Mushola Terminal Type B Randik Muba

NO	Nama Barang	Alamat Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
9	Bangunan Gedung Terminal Type B Muaraduo OKUS	Muaraduo Liwa Kab, Oku Selatan	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD, kios Terminal Type B Muaraduo
10	Bangunan Gedung Terminal Type B Martapura	Jl. lintas Sumatera km. 7 Kotabaru Selatan Martapura 32182	Tanah dan Bangunan Gedung 2 Lt. UPTD Terminal Type B Martapura
11	Bangunan Gedung Terminal Type B Lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Belitang Madang Raya	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Lubuk Harjo
12	Bangunan Gedung Terminal Type B Petanang	Jl. A. Yani Petanang Kota Lubuk Linggau	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD Terminal Type B Petanang
13	UPPKB Pematang Panggang	Pematang Pamggang, Kec.Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir	Tanah dan Bangunan Gedung Timbangan
14	UPPK Nibung	Jl.Sarolangun-Lubuk Linggau,Lesung Batu Muda, Kec. Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas	TAnah dan BAngunan Gedung Timbangan

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

1.5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan transportasi Sumatera Selatan pada masa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan;
2. Mengoptimalkan fungsi simpul transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara);
3. Digitalisasi dan Peningkatan layanan public transportasi;

4. Meningkatkan fungsi pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
5. Mengembangkan sistem angkutan yang berbasis angkutan massal.
6. Pengendalian V/C Ratio dan manajemen lalu lintas
7. Penanganan titik rawan kecelakaan dan keselamatan
8. Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi
9. Mendorong penyediaan angkutan umum pada Daerah yang belum terlayani
10. Optimalisasi Penggunaan Angkutan Umum Darat
11. Optimalisasi Penggunaan Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan
12. Mendorong percepatan jalan khusus sesuai aturan dan percepatan operasional alur sungai musi 24 jam
13. Optimalisasi transportasi multimoda
14. Mendukung Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat
15. Optimalisasi Pengawasan Angkutan Barang

1.6 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas
2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi;
3. Meningkatnya Layanan Transportasi;
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah;

Tabel 1.18 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA BASELINE (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio	Rasio	0,392	0,390	0,388	0,385	0,383	0,382	0,381
				2. Rata – rata load factor angkutan umum	Persentase	70	71	71,5	72	72,5	73	73,5
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	3. Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	Persentase	97	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Layanan Transportasi	4. Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,630	0,634	0,660	0,685	0,710	0,735	0,760
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	5. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	94,67	100	100	100	100	100	100

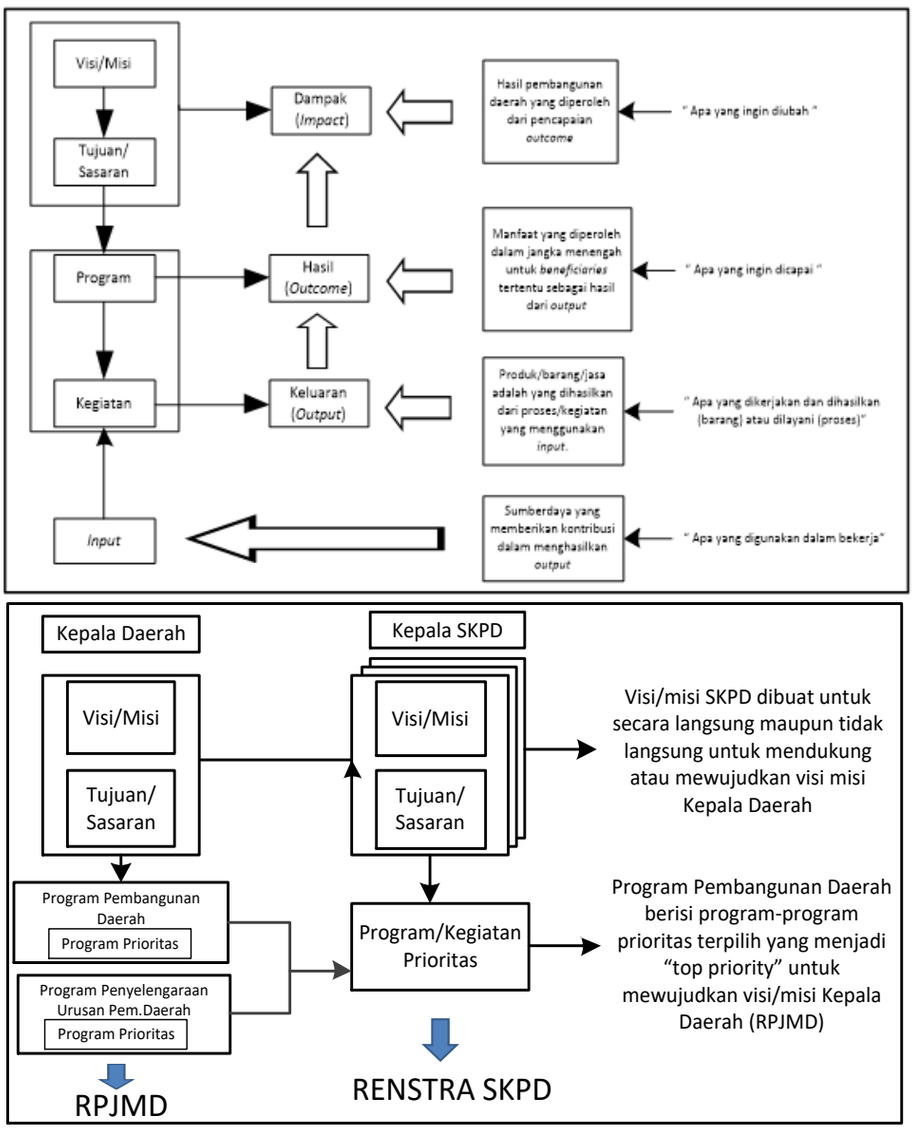

Gambar 1.2 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

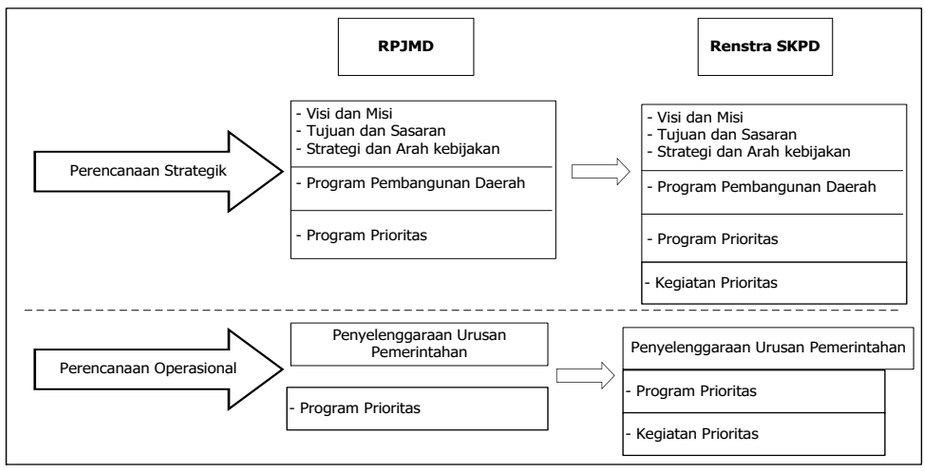

Gambar 1.3 Keterhubungan Renstra dengan RPJMD

Tabel 1.19 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pelayanan PD

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ISU STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI				
							2025	2026	2027	2028	2029
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio	Menurunnya kinerja jaringan jalan akibat kemacetan	Pengendalian V/C Ratio dan manajemen lalu lintas	Survei dan evaluasi kapasitas ruas jalan	Peningkatan kapasitas dan manajemen lalu lintas	Implementasi pengendalian lalu lintas berbasis ITS	Penataan ruang dan jalur kendaraan berat	Optimalisasi peran jalan alternatif
				2. Rata – rata load factor angkutan umum	Rendahnya tingkat keterisian angkutan umum	Revitalisasi angkutan umum	Pemetaan potensi dan trayek prioritas	Pengadaan Angkutan Perintis	Revitalisasi rute dan manajemen trayek	Promosi dan insentif penggunaan angkutan umum	Evaluasi load factor dan sistem subsidi
			Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi	3.Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi	Masih rendahnya tingkat keselamatan transportasi provinsi	Penanganan titik rawan kecelakaan dan keselamatan	Identifikasi dan pemetaan titik rawan kecelakaan	Pembangunan dan penyediaan sarana keselamatan transportasi (rambu dan marka jalan)	Pelatihan pengemudi dan sosialisasi keselamatan	Penegakan hukum dan pengawasan keselamatan transportasi	Evaluasi dan penguatan sistem keselamatan transportasi daerah

				4. Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Belum terpasangnya Perlengkapan Jalan Provinsi sesuai kondisi ideal	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 5%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 2%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 3%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 3%	Penyediaan Perlengkapan Jalan Provinsi sebesar 2%
				5. Cakupan / Persentase Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Belum optimalnya fasilitas keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Sosialisasi Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyusunan Dokumen Inventarisasi Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Sertifikasi Kompetensi SDM Penjaga Pintu Perlintasan Sebidang	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi	Penyediaan Fasilitas Keselamatan pada Perlintasan Kereta Api di Jalan Provinsi
				6. Persentase sarana Angkutan Sungai yang memenuhi standar	Belum optimalnya konektivitas angkutan umum di Sumatera Selatan	Mendorong penyediaan angkutan umum pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Perintis pada Daerah yang belum terlayani	Penyediaan Angkutan Umum pada Daerah yang belum terlayani
			Meningkatnya Layanan Transportasi	7.Rasio Konektivitas Transportasi	Rendahnya tingkat konektivitas antarwilayah	Penguatan simpul transportasi	Identifikasi missing link dan simpul prioritas	Sinkronisasi perencanaan konektivitas dengan kab / kota	Pembangunan jaringan konektivitas strategis berbasis data	Integrasi jaringan moda darat dan laut	Evaluasi dan pemutakhiran konektivitas wilayah

				8. Persentase Trayek Angkutan Umum yang Terlayani	Belum optimalnya penggunaan angkutan umum Darat	Optimalisasi Penggunaan Angkutan Umum Darat	Survei Load Factor Angkutan Umum	Survei Inventarisasi Angkutan Umum	Survei Interview pada Masyarakat dan melakukan pemetaan Demand Angkutan Umum	Mendorong penggunaan angkutan umum darat dengan analisa harga dan kebutuhan armada	Mendorong penggunaan angkutan umum dengan peningkatan fasilitas
				9. Load Factor Angkutan Umum Darat (AKDP)	Belum optimalnya angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumatera Selatan	Optimalisasi Penggunaan Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan	Survei Load Factor Angkutan Sungai danau dan penyeberangan	Survei Inventarisasi Angkutan Sungai danau dan penyeberangan	Survei Interview pada Masyarakat terkait keselamatan perjalanan	Optimalisasi Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai danau dan penyeberangan	Mendorong penggunaan angkutan sungai danau dan penyeberangan dengan peningkatan keselamatan dan penertiban izin operasi
				10. Load Factor Angkutan Umum Sungai (Lintas Kab/Kota)	Belum terpenuhinya simpul transportasi kewenangan provinsi yang sesuai standar	Mendorong peningkatan kualitas simpul transportasi yang sesuai standar	Survei Inventarisasi simpul	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar	Mendorong peningkatan fasilitas simpul yang sesuai standar

					Belum optimalnya infrastruktur batubara	Mendorong percepatan jalan khusus sesuai aturan dan percepatan operasional alur sungai musi 24 jam	Pengawasan ODOL	Survey Alur Sungai Musi	Penyusunan DED terkait alur sungai musi 24 jam	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam
					Belum Optimalnya transportasi multimoda	Optimalisasi transportasi multimoda	Melaksanakan pemetaan terminal integrasi dan terminal multimoda	Melaksanakan evaluasi terhadap fasilitas integrasi pada simpul	Pembahasan Rencana Pebaikan Fasilitas Integrasi dan Multimoda bersama Stakeholder	Mendorong Rencana Pebaikan Fasilitas Integrasi dan Multimoda bersama Stakeholder	Penyusunan DED terkait Integrasi dan Multimoda
					Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung Pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung pemenuhan dokumen administrasi, dokumen teknis dan sertifikasi lahan	Mendukung pemenuhan dokumen administrasi, dokumen teknis dan sertifikasi lahan	Mendukung penyiapan berbagai dokumen dan fasilitasi, baik pembangunan fisik pelabuhan maupun operasional	Mendukung pembangunan fisik New Palembang Port Tanjung Carat	Mendukung pembangunan fisik New Palembang Port Tanjung Carat
					Belum Optimalnya pengawasan angkutan barang	Optimalisasi Pengawasan Angkutan Barang	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Pengawasan ODOL	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Barang

			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	11. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja layanan transportasi belum optimal	Digitalisasi dan peningkatan layanan public transportasi	Penetapan Indikator Layanan Minimum	Digitalisasi data dan Sistem informasi transportasi	Penguatan Sistem Pengaduan dan Monev layanan	Perlibatan masyarakat dalam penilaian layanan	Evaluasi kinerja dan reformasi kelembagaan

1.7 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.8 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendalakendala yang dihadapi dalam pencapaiannya
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahun lalu dan perjanjian kinerja tahun pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sektor perhubungan diarahkan pada meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas.

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka pembangunan sektor perhubungan diprioritaskan pada meningkatnya keselamatan transportasi provinsi, meningkatnya layanan transportasi, dan meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah.

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, adapun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,720
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2	Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	Pelabuhan	2
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3	Jumlah Terminal Tipe B	Terminal	7
			4	Load Factor Penumpang Kereta Api	%	85
			5	Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9
			6	Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	71
			7	Load Factor Angkutan Barang Darat	%	70
			8	Load Factor Angkutan	%	56

				Barang Laut		
			9	Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	55
			10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	70,50
			11	On Time Performance Layanan Transportasi	%	58,90
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,405

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas	1	V/C Rasio	Rasio	0,390
		2	Rata – rata Load Factor angkutan umum	%	71
2	Meningkatnya Layanan Transportasi	3	Rasio Konektivitas Transportasi	%	0,634

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tertuang pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.3 Program Kegiatan Tahun 2025

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Tahun 2025	
			Target Kinerja	Pagu (Rp)
1	*2*	*3*	*5*	*7*
I	**Bidang Perhubungan**			**70.866.344.997**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi**	**92%**	**42.285.846.437**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**657.500.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	452.500.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan**	**4 Dokumen**	**23.558.030.353**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	23.058.808.000
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	414.222.353
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	35.000.000
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah**	**5 Dokumen**	**332.500.000**
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0
14	Pengamanan Barng Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	207.500.000
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0

17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	125.000.000
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis**	**215 Orang**	**511.110.250**
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	32.500.000
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	282.500.000
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	156.110.250
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	40.000.000
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD**	**4 Dokumen**	**945.500.000**
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	40.000.000
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	61.000.000
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	0
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Paket	0
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	120.000.000
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000
28	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	100.000.000

29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	492.500.000
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Tersedia**	**13 Unit**	**1.490.000.000**
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	8 Unit	0
33	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	1.490.000.000
34	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	0
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor**	**3 Laporan**	**7.616.251.000**
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	768.000.000
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	6.838.251.000
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Terpelihara**	**460 Unit**	**2.385.353.950**
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	225.500.000
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	611.500.000

40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	285.000.000
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Unit	100.000.000
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	300.000.000
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	633.353.950
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	412 Unit	230.000.000
IX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BMD yang tersedia**	**1 Unit**	**4.789.600.884**
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	4.789.600.884
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan**	**0.720 Rasio**	**16.407.902.510**
I	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia**	**1 Dokumen**	**0**
46	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	0
II	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia**	**6 Unit**	**5.702.161.710**
47	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit	5.702.161.710
III	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah terminal tipe B yang dikelola**	**7 Terminal**	**7.456.000.000**
48	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 Terminal	6.908.500.000

49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Terminal	547.500.000
IV	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**2 Laporan**	**562.000.800**
50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	472.000.800
51	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	90.000.000
V	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**1 Laporan**	**27.900.000**
52	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	27.900.000
VI	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**	**1 Laporan**	**250.000.000**
53	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	100.000.000
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	150.000.000
55	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	0
VII	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum**	**6 Unit**	**1.862.500.000**
56	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	165.000.000

57	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Unit	1.697.500.000
VIII	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan**	**1 Dokumen**	**0**
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkoktaan untuk Aangkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	0
IX	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampauai Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum**	**1 Dokumen**	**405.000.000**
59	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebiajakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	405.000.000
X	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan**	**4 Unit**	**142.340.000**
60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	142.340.000
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Jumlah Trip Perjalanan Kapal**	**3.702 Trip**	**11.653.737.500**
I	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	**1 Unit**	**638.997.500**

61	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	638.997.500
II	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	**1 Dokumen**	**228.730.000**
62	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	228.730.000
III	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	**1 Dokumen**	**108.155.000**
63	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barng, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	108.155.000
IV	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKp**	**2 Dokumen**	**952.040.000**

64	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	952.040.000
V	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun**	**50%**	**8.669.720.000**
65	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	53.320.000
66	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	7.825.000.000
67	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	791.400.000
VI	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau**	**2 Laporan**	**696.095.000**
68	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	191.365.000
69	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	504.730.000
VII	**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan**	**1 Laporan**	**360.000.000**
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	360.000.000

IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Jumlah Penumpang Kereta Api**	**2.126.341 Orang**	**518.858.550**
I	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	**358.497.000**
71	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	358.497.000
II	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**106.493.650**
72	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	0
73	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	106.493.650
III	**Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus**	**1 Dokumen**	**53.867.900**
74	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	53.867.900
	Jumlah			**70.866.344.997**

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam perjanjian kinerja beserta nilai targetnya adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1	Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,720
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2	Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	Pelabuhan	2
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3	Jumlah Terminal Tipe B	Terminal	7
		4	Load Factor Penumpang Kereta Api	%	85
		5	Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9
		6	Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	71
		7	Load Factor Angkutan Barang Darat	%	70
		8	Load Factor Angkutan Barang Laut	%	56
		9	Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	55
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	70,50
		11	On Time Performance Layanan Transportasi	%	58,90
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12	V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,405

TABEL 2.5 PERJANJIAN KINERJA SETELAH PERUBAHAN

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas	1	V/C Rasio Jalan Provinsi	Rasio	0,390
		2	Rata – rata load factor angkutan umum	%	71
2	Meningkatnya Layanan Transportasi	3	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	Rasio	0,634

Selain target pencapaian indicator sasaran, pada perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan juga memuat program – program yang dilaksanakan. Adapun Program yang dilaksanakan pada APBD 2025 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	42.285.846.437	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.407.902.510	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	11.653.737.500	APBD
4	Program Perkeretaapian	518.585.550	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap)*.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Sebagai informasi tambahan Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator

kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada Tahun 2024 ini.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkunan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran strategis Instansi Pemerintah. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja.

Dari 3 Sasaran Stretegis ditetapkan 3 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

3.2.1 Rasio Konektivitas Transportasi

Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi digitung berdasarkan ketentuan Permendagri 18 Tahun 2020. Yaitu merupakan gabungan dari konektivitas angkutan jalan (IK1) dan konektivitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (IK2) dengan bobot masing – masing moda.

Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

1. IK1 (Angkutan Jalan)

$$= \frac{Jumlah\ Trayek\ yang\ dilayani\ pada\ provinsi\ x\ bobot\ trayek}{Jumlah\ kebutuhan\ trayek\ pada\ provinsi\ tersebut}$$

$$= \frac{24x1}{48}$$

$$= \frac{24}{48}$$

$$= 0{,}50$$

2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)

$$= \frac{Jumlah\ lintas\ penyeberangan\ yang\ beroperasi\ pada\ provinsi\ tsb\ x\ bobot\ lintas}{Jumlah\ kebutuhan\ lintas\ penyeberangan\ pada\ provinsi\ tersebut}$$

$$= \frac{30x1}{30}$$

$$= \frac{30}{30}$$

$$= 1$$

Konektivitas Transportasi Darat 0,46, Bobot Konektivitas Transportasi 70%, Konektivitas Transportasi Laut 0,3 Bobot Konektivitas Transportasi 30%.

$$KTPROV = (KTD\ x\ WTD) + (KTASDPL\ x\ WTASDPL)$$

$$KTPROV = (0{,}50\ x\ 0{,}70) + (1\ x\ 0{,}30)$$

KTPROV = 0,35 + 0,30

$$KTPROV = 0{,}650$$

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai IK1 (angkutan jalan) sebesar 0,50 yang menunjukkan bahwa dari total 48 trayek, baru 24 trayek yang terlayani. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konektivitas angkutan jalan belum optimal, karena masih terdapat sekitar 50% kebutuhan trayek yang belum terpenuhi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan armada, belum meratanya jangkauan pelayanan ke wilayah tertentu, serta adanya perubahan pola permintaan transportasi masyarakat.

Sementara itu, nilai IK2 (angkutan sungai, danau, dan penyeberangan) sebesar 1**,** yang berarti seluruh kebutuhan lintas penyeberangan telah terpenuhi dan beroperasi secara penuh. Capaian ini menunjukkan bahwa konektivitas pada sektor SDP telah optimal**,** didukung oleh terpenuhinya seluruh lintas yang dibutuhkan serta berfungsinya layanan secara menyeluruh dalam menghubungkan wilayah-wilayah perairan.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TW IV TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	Rasio	0,634	0,650	102,52

Dengan bobot konektivitas angkutan darat sebesar 70% dan angkutan SDP sebesar 30%, diperoleh nilai Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi (KTPROV) sebesar 0,650. Nilai ini melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 0,634, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 102,52%.

Renstra Dinas Perhubungan menetapkan target Rasio Konektivitas Transportasi sebesar 0,634 pada Tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga 0,760 pada Tahun 2030. Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keterhubungan wilayah melalui penyediaan jaringan transportasi yang terintegrasi.

Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Tahun 2025 telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan pada tahun pertama Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Evaluasi atas capaian tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pengembangan konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan simpul transportasi, integrasi antarmoda, serta perluasan jangkauan pelayanan transportasi agar target jangka menengah sampai akhir periode Renstra dapat tercapai secara berkelanjutan.

Meskipun target telah terlampaui, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa capaian ini lebih banyak didorong oleh kinerja optimal pada sektor angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, yang memiliki nilai maksimal (rasio = 1). Sementara itu, kontribusi angkutan jalan masih relatif terbatas akibat belum terpenuhinya seluruh kebutuhan trayek.

Dengan demikian, secara keseluruhan capaian Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi sudah tergolong baik dan memenuhi

target, namun masih terdapat ketimpangan antar moda transportasi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan konektivitas ke depan perlu difokuskan pada pengembangan jaringan trayek angkutan jalan, khususnya pada wilayah yang belum terlayani, agar tercapai keseimbangan konektivitas antar moda serta peningkatan aksesibilitas masyarakat secara lebih merata.

3.2.2 Rata – Rata Load Factor Angkutan Umum

Rata-rata *load factor* angkutan umum merupakan indikator penting dalam menilai tingkat keterisian dan efisiensi pemanfaatan kapasitas moda transportasi. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan kapasitas tersedia pada masing-masing moda.

Dalam konteks ini, rata-rata *load factor* angkutan umum disusun dari beberapa komponen utama, yaitu *load factor* penumpang kereta api dan LRT, *load factor* penumpang kapal laut, serta *load factor* penumpang bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Masing-masing komponen tersebut mencerminkan karakteristik permintaan dan pola pergerakan masyarakat pada moda transportasi yang berbeda.

1. Load Factor Penumpang Kereta api dan LRT

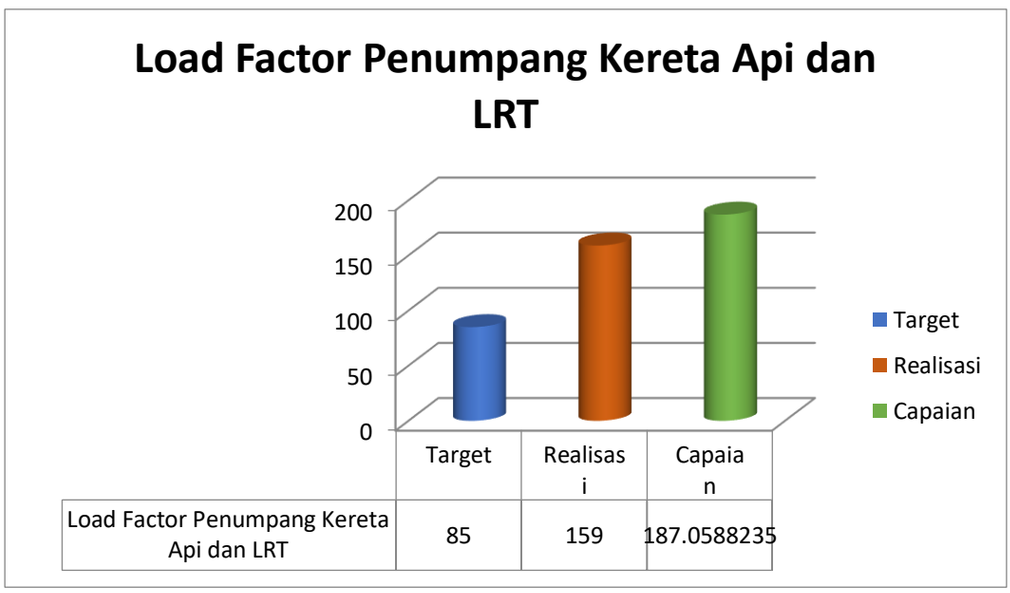

Gambar 3.7 Load Factor Penumpang Kereta Api dan LRT Tahun 2025

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kereta Api Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	Load Factor Penumpang Kereta api dan LRT	%	85	159	187,05

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kereta Api

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Kereta Api dan LRT	%	80	75	85	187,05

Capaian *Load Factor* Penumpang Kereta Api dan LRT pada Tahun 2025 mencapai 187,05% dari target yang ditetapkan sebesar 85%, yang menunjukkan bahwa tingkat keterisian penumpang secara umum telah melampaui kapasitas yang direncanakan. Secara rinci, *load factor* penumpang kereta api mencapai 120%, sedangkan LRT sebesar 39%, dengan total capaian agregat sebesar 159%. Realisasi ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 47,16%.

Tingginya capaian tersebut terutama didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum massal, khususnya kereta api yang dinilai lebih andal, tepat waktu, dan terjangkau. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat, optimalisasi jadwal perjalanan, serta mulai berkembangnya keterpaduan layanan antarmoda turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat keterisian penumpang kereta api. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan capaian secara keseluruhan.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, capaian yang tinggi tersebut tidak merata antar moda. *Load factor* LRT masih relatif rendah, yaitu sebesar 39%, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan kapasitas LRT belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan jaringan yang belum sepenuhnya menjangkau kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat, serta belum optimalnya integrasi layanan lanjutan (*first mile–last mile*). Selain itu, preferensi masyarakat terhadap moda transportasi lain serta pola perjalanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan lintasan LRT juga menjadi faktor penghambat.

Dengan demikian, meskipun secara agregat capaian *load factor* telah melampaui target dan menunjukkan kinerja yang sangat baik, kondisi ini juga mengindikasikan adanya ketimpangan pemanfaatan antar moda transportasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya peningkatan integrasi layanan, pengembangan jaringan, serta strategi peningkatan minat masyarakat terhadap LRT agar capaian kinerja dapat lebih merata dan berkelanjutan.

2. Load Factor penumpang Kapal Laut

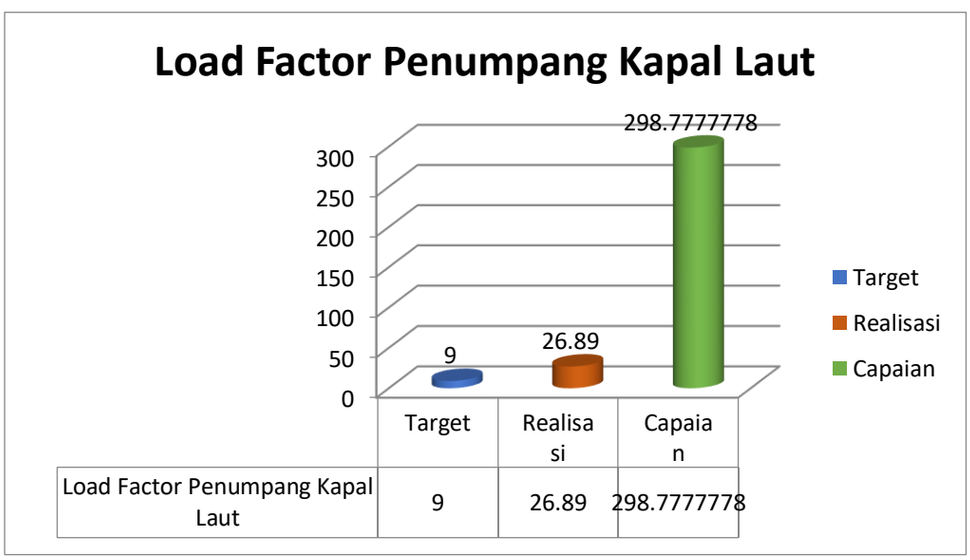

	Target	Realisasi	Capaian
Load Factor Penumpang Kapal Laut	9	26.89	298.7777778

Gambar 3.8 Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2025

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9	26,89	298,78

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kapal Laut

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9	20	9	26,89

Capaian Load Factor Penumpang Kapal Laut Capaian Realisasi nya mencapai 298,78% adapun target yang ditetapkan sebesar 9% dan capaian realisasi 26,89%.

Capaian Load Factor Penumpang Kapal Laut yang mencapai 298,78% dari target ditetapkan didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dalam menggunakan angkutan laut, khususnya pada periode tertentu seperti musim libur dan hari besar keagamaan. Selain itu, kemudahan pemesanan tiket secara online serta ketersediaan informasi jadwal dan keberangkatan kapal yang semakin transparan dan mudah diakses turut meningkatkan minat dan kepastian perjalanan bagi masyarakat. Optimalisasi kapasitas angkut kapal dan penyesuaian jadwal pelayaran juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat keterisian penumpang, sehingga realisasi Load Factor mencapai 26,89%**,** jauh melampaui target sebesar 9%**.**

Meskipun capaian kinerja melampaui target, masih terdapat kendala yang mempengaruhi pemerataan tingkat keterisian penumpang, antara lain ketergantungan terhadap musim dan kondisi cuaca, yang dapat mempengaruhi frekuensi dan kepastian jadwal pelayaran. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelabuhan, serta fluktuasi permintaan penumpang pada hari-hari non-puncak menyebabkan tingkat Load Factor belum stabil sepanjang tahun dan berpotensi menurunkan konsistensi kinerja layanan.

3. Load Factor penumpang Bus AKDP

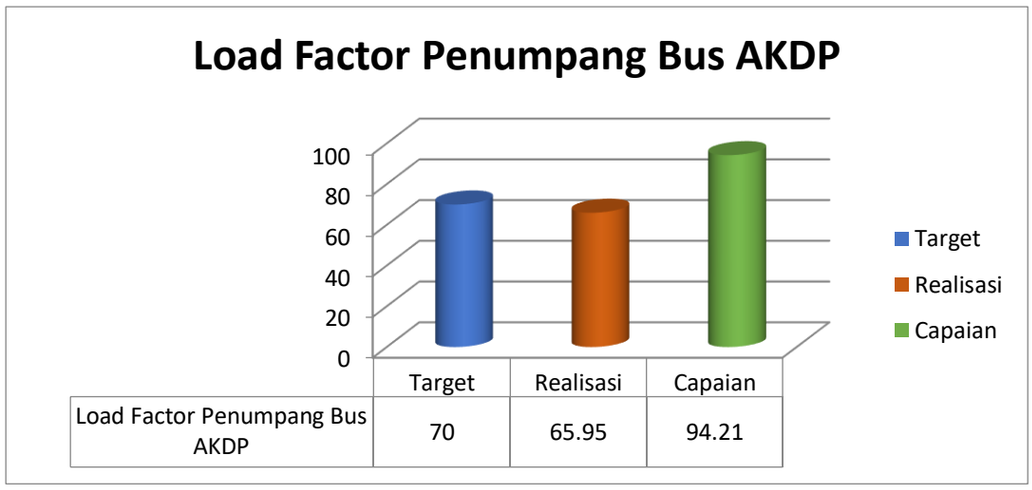

Gambar 3.9 Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2025

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	70	65,95	94,21

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Bus AKDP

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	70	64	70	65,95

Load Factor Penumpang Bus AKDP pada Tahun 2025 mencapai 65,95% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 94,21%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat keterisian penumpang Bus AKDP telah mendekati target, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan penumpang, khususnya pada hari-hari non-puncak. Namun demikian, secara umum layanan Bus AKDP tetap berfungsi dengan baik dalam mendukung mobilitas masyarakat antar daerah.

Dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan, di mana realisasi Load Factor pada Tahun 2024 sebesar 64% meningkat menjadi 65,95% pada Tahun 2025, atau mengalami kenaikan sebesar 1,03%. Meskipun terjadi peningkatan, target belum tercapai akibat meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta berkembangnya layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mendorong masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan online sebagai moda perjalanan.

Rata – rata Load Factor Angkutan Umum

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Rata – rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5	Rata – rata Load Factor Angkutan Umum	%	71	75,94	106,95

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Rata – rata Load Factor Angkutan Umum Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rata – rata Load Factor Angkutan Umum	%	29%	53%	71	83,94

Rata-rata *load factor* angkutan umum dihitung sebagai nilai rata-rata dari *load factor* penumpang pada beberapa moda angkutan umum, yaitu Kereta Api dan LRT, angkutan penyeberangan laut, serta angkutan darat AKDP. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan *load factor* masing-masing moda, kemudian dibagi dengan jumlah moda yang dihitung

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Rata-rata *load factor* angkutan umum

=(*Load factor* Kereta Api dan LRT + *Load factor* Kapal Laut + *Load factor* AKDP) / 3

= (159% + 26,89% + 65,95%) / 3

= **83,94%**

Nilai tersebut mencerminkan tingkat keterisian rata-rata penumpang angkutan umum secara agregat lintas moda pada tahun berjalan.

Dalam Renstra Tahun 2025–2029, target Rata-rata Load Factor Angkutan Umum ditetapkan sebesar 71% pada Tahun 2025 dan meningkat secara bertahap menjadi 73,5% pada Tahun 2030. Peningkatan target tersebut menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemanfaatan angkutan umum oleh masyarakat.

Realisasi rata-rata load factor angkutan umum Tahun 2025 telah melampaui target tahun pertama Renstra, yang menunjukkan peningkatan tingkat keterisian angkutan umum dibandingkan target yang ditetapkan. Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat perbedaan tingkat keterisian antar moda transportasi sehingga diperlukan upaya peningkatan pelayanan, penataan trayek, integrasi antarmoda, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga tren peningkatan capaian hingga memenuhi target jangka menengah Renstra.

Rata-rata *load factor* angkutan umum pada Tahun 2025 mencapai 83,94%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 71%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat tingkat keterisian penumpang angkutan umum berada pada kondisi yang relatif baik. Namun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan antar moda transportasi, di mana beberapa moda memiliki tingkat keterisian yang sangat tinggi, sementara moda lainnya masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya lanjutan dalam rangka peningkatan integrasi antarmoda, penyesuaian layanan, serta penguatan kebijakan untuk mendorong pemerataan penggunaan angkutan umum. Dengan demikian, meskipun target telah terlampaui, peningkatan kinerja ke depan perlu difokuskan pada optimalisasi moda dengan *load factor* yang masih rendah.

3.2.3 V/C Ratio Jalan Provinsi

NO	NOMOR RUAS JALAN			NAMA RUAS JALAN	Volum (SMP/JAM)	Kapasitas (SMP/JAM)	V/C Rasio	Level Of Service (LoS)
1	1	1	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG (PALEMBANG)	1.213,230	2.834,00	0,428	B
2	1	2	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	1.691,32	3.643,00	0,415	B
3	1	3	K	JLN. KOL ATMO (PALEMBANG)	2.396,050	5.881,00	0,210	B
4	1	4	K	JLN. BRIGJEN. HM. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)	1.621,300	2.652,00	0,360	C
5	1	5	K	JLN. KOL. AHMAD BADARUDDIN - JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	1.760,400	2.940,50	0,227	C
6	1	6	K	JLN. PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	2.302,430	3.421,00	0,673	C
7	1	7	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	1.529,600	2.842,00	0,390	C
8	1	8	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	2.205,18	3.324,00	0,530	C
9	1	9	K	JLN. WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	1.327,520	3.258,00	0,295	B
10	1	10	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SOEPRAPTO (PALEMBANG)	2.438,450	3.000,00	0,680	D
11	1	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)	1.809,50	2.492,00	0,476	C
12	1	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	1.940,200	2.940,50	0,503	C
13	1	13	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	1.596,700	2.290,00	0,780	C
14	1	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	1.324,690	3.322,00	0,555	B
15	1	15	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	1.865,990	3.000,00	0,690	C
16	1	16	K	JLN. PANGERAN RATU – PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN (PALEMBANG)	1.620,430	2.940,50	0,323	C
17	1	17	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	1.540,310	2.940,50	0,600	C
18	1	18	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2.640,150	3.197,50	0,600	D
19	1	19	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	2.426,800	3.013,00	0,440	D

20	1	20	K	JLN. PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) – BTS. BANYUASIN	1.268,080	2.690,00	0,680	B
21	1	21	K	JL. PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	855,050	2.290,00	0,373	B
22	1	22	K	JLN. KAPT ABDULLAH - JLN. ROBANI KADIR	1.633,520	3.048,00	0,670	C
23	1	23	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) - BTS. KAB. BANYUASIN	1.195,390	2.490,00	0,480	B
24	1	24	K	JLN. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	2.009,400	3.196,00	0,390	C
25	1	25	K	BTS. KOTA PALEMBANG - KENTEN LAUT (BANYUASIN)	1.207,080	2.530,00	0,477	C
26	1	26	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	1.118,470	2.346,97	0,477	C
27	1	27	K	JLN. TAQWA MATA MERAH (PALEMBANG) - MERAH MATA (BTS. BANYUASIN)	984,100	2.490,00	0,395	B
28	1	28	K	JLN. ADI SUCIPTO - BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	1.403,660	2.690,00	0,522	C
29	2			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKAJADI (BANYUASIN)	1.055,620	2.690,00	0,392	B
30	3			BTS. KOTA PALEMBANG - SUKOMORO (BANYUASIN)	1.022,370	2.690,00	0,380	B
31	4			PLAJU - SP. SUNGAI PINANG - BTS. KAB. OKI	1.008,540	2.690,00	0,375	B
32	5			JLN. KTM RAMBUTAN - SP. LOROK	797,820	2.290,00	0,348	B
33	6			SP. OPI – BABATAN SAUDAGAR – SRIJABO	826,660	2.750,00	0,301	B
34	7			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA - SP. LOROK	587,180	1.750,00	0,336	B
35	8			BTS. KAB. BANYUASIN - CELIKAH (KAYU AGUNG)	1.007,930	2.697,00	0,374	B
36	9			SP. MERANJAT - BTS. KAB. MUARA ENIM	570,330	1.650,00	0,346	B
37	10			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	592,610	2.150,00	0,276	A
38	11			TANJUNG RAJA - SP. TAMBANG RAMBANG	855,430	2.797,00	0,306	B
39	12			SP. PENYANDINGAN - BTS. KAB. OKUT	554,900	1.537,39	0,361	B
40	13			JLN. AKSES TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	670,850	2.453,00	0,273	A

41	14			TRANS SP. 1 - SP. TANAH ABANG	671,260	2.567,00	0,261	A
42	15			CEMPAKA - TRANS SP. 1	1.005,240	2.436,59	0,413	B
43	16			SP. TAMBANG RAMBANG - BTS. KAB. OKU	643,890	2.797,00	0,230	A
44	17			LUBUK SEBERUK - SUMBU SARI - MATARAM JAYA	427,460	1.664,26	0,257	A
45	18			BTS. KAB. OKI - SP. KEPUH	487,860	1.664,26	0,293	B
46	19			BTS. KAB. OGAN ILIR - PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII)	322,650	1.664,26	0,194	A
47	20			SEKAYU – BTS. KAB. PALI	1.024,440	2.679,95	0,382	B
48	21			BETUNG – PETANGGAN	471,640	1.664,26	0,283	B
49	22			DABUK REJO - BTS. KAB. OKUT	438,330	1.564,26	0,280	A
50	23			PETANGGAN - TJ. KEMUNING - BTS. KAB. OKI	448,760	1.764,26	0,254	A
51	24			GUMAWANG – RASUAN (SP. KEPUH)	523,210	1.664,26	0,314	B
52	25			PENINJAUAN (SP. BATUMARTA UNIT XII) - SP. LUBUK BATANG	419,870	1.764,26	0,238	A
53	26			GUMAWANG - PETANGGAN	490,560	1.288,88	0,381	B
54	27			SP. KEPUH - KURUNGAN NYAWA	542,410	1.504,63	0,360	B
55	28			KURUNGAN NYAWA - GUMAWANG	446,280	1.335,00	0,334	B
56	29			KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	796,600	2.453,00	0,325	B
57	30			MARTAPURA - SP. MARTAPURA	735,410	2.127,30	0,346	B
58	31			SP. SUKJADI (BATURAJA) - SP. LENGKITI	973,540	2.427,30	0,401	B
59	32			SP. LENGKITI - SP. MARTAPURA	761,600	2.167,87	0,351	B
60	33			SP. MARTAPURA - MUARA DUA	821,780	2.327,30	0,353	B
61	34			MUARA DUA - SP. HAJI	528,690	2.064,17	0,256	A
62	35			SP. HAJI - SP. CAMPANG	515,320	2.064,70	0,250	A
63	36			SP. CAMPANG - SP. MUARA SINDANG	324,420	1.664,26	0,195	A
64	37			SP. MUARA SIDANG - BTS. PROV BENGKULU	305,760	1.457,76	0,210	A
65	38			MUARA DUA - SP. SENDER	391,320	1.664,26	0,235	A
66	39			SP. SENDER - BTS. PROV. LAMPUNG	515,320	1.764,26	0,292	B

67	40			LEMBAK - BTS. KAB. OGAN ILIR	356,420	1.664,26	0,214	A
68	41			LEMBAK - MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	372,520	1.564,26	0,238	A
69	42			BTS. KAB. OGAN ILIR - BERINGIN	320,780	1.335,00	0,240	A
70	43			SP. RAJA – MODONG (BTS. KAB. MUARA ENIM)	795,620	2.742,00	0,290	B
71	44			SP. AIR ITAM - SP. TALANG BULANG	1.279,670	1.664,26	0,769	C
72	45			BTS. KAB. MUBA - SP. AIR ITAM	476,310	2.453,00	0,194	A
73	46			JLN. SP. BELIMBING - PENDOPO (PALI)	574,940	2.742,00	0,210	A
74	47			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) - BTS. KAB. MURA	785,320	2.767,00	0,284	B
75	48			SP. 9 BANGUN JAYA - SP. KULIM (BTS. PALI)	755,320	2.679,95	0,282	B
76	49			SP. SUGIHWARAS - BTS. KAB. LAHAT	588,720	2.538,90	0,232	A
77	50			SP. SEMAMBANG - SP. 9 BANGUN JAYA (MUSIRAWAS)	478,720	2.111,75	0,227	A
78	51			BTS. KAB. MUARA ENIM - SP. AIR DINGIN	925,280	2.244,60	0,412	B
79	52			MUARA SIBAN - SP. EMBACANG	787,560	2.648,10	0,297	B
80	53			KEBAN AGUNG - SP. TJ. ARO (PAGARALAM)	721,560	2.427,00	0,297	B
81	54			TJ. CERMIN - PERANDONAN (PAGARALAM)	671,560	2.111,75	0,318	B
82	55			TEBING TINGGI - PENDOPO (EMPAT LAWANG)	640,520	2.261,75	0,283	B
83	56	K		JLN. HANDAYANI (KOTA LUBUK LINGGAU) - TUGUMULYO (KAB. MUSI RAWAS)	986,280	2.261,75	0,436	B
84	57			TEBING TINGGI - TANJUNG RAYA	1.061,920	2.462,73	0,431	B
85	58			SP. PERIUK - TUGU MULYO - TERAWAS	325,810	1.925,10	0,169	A
86	59			PAGARALAM - TANJUNG RAYA	1.076,290	1.925,10	0,559	C
87	60			TERAWAS - TABATINGGI - MAUR	1.263,900	2.513,50	0,503	C
88	61			TANJUNG RAYA - BTS. PROV BENGKULU	884,050	2.538,900	0,348	B
Rata-rata V/C Ratio							**0,371**	**B**

Tabel 3.11 V/C Rasio Jalan Provinsi Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2025			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	V/C Rasio Jalan Provinsi	%	0,390	0,371	105,39

Tabel 3.12 Target dan Realisasi V/C Rasio Jalan Provinsi Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
V/C Rasio Jalan Provinsi	%	0,392	0,390	0,390	0,371

Pada Tahun 2025, kinerja V/C Rasio Jalan Provinsi menunjukkan capaian yang sangat baik. Target V/C rasio yang ditetapkan sebesar 0,390, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 0,371. Capaian ini menghasilkan tingkat kinerja sebesar 105,39%, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui.

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, target indikator V/C Ratio Jalan Provinsi ditetapkan sebesar 0,390 pada Tahun 2025 dan secara bertahap menurun menjadi 0,381 pada Tahun 2030 sebagai upaya meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui pengendalian tingkat kejenuhan jalan.

Realisasi V/C Ratio Jalan Provinsi Tahun 2025 sebesar 0,371, sehingga telah melampaui target tahun pertama Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, serta peningkatan kapasitas ruas jalan telah memberikan hasil yang baik. Dengan capaian tersebut, kinerja indikator telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah Renstra. Ke depan, evaluasi akan terus dilakukan melalui survei lalu lintas secara berkala, optimalisasi manajemen lalu lintas, dan pengendalian pertumbuhan volume kendaraan agar capaian tetap terjaga hingga akhir periode Renstra.

Nilai V/C rasio menggambarkan perbandingan antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan, di mana semakin rendah nilai V/C rasio maka kinerja pelayanan jalan semakin baik dan kondisi lalu lintas

semakin lancar. Dengan realisasi V/C rasio yang lebih rendah dibandingkan target, dapat disimpulkan bahwa ruas-ruas jalan provinsi pada Tahun 2025 masih mampu melayani arus lalu lintas secara optimal tanpa mengalami kejenuhan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, kinerja V/C rasio jalan provinsi menunjukkan tren perbaikan. Realisasi V/C rasio pada Tahun 2024 sebesar 0,390 menurun menjadi 0,371 pada Tahun 2025. Penurunan nilai ini mengindikasikan peningkatan kelancaran lalu lintas yang dapat dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan kualitas jalan, pengelolaan lalu lintas yang lebih efektif, serta distribusi arus kendaraan yang lebih merata pada jaringan jalan provinsi.

Secara keseluruhan, capaian V/C rasio jalan provinsi pada Tahun 2025 mencerminkan kondisi pelayanan lalu lintas yang semakin lancar dan andal, sehingga mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang, serta peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah provinsi.

3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Dari 3 Sasaran Stretegis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terdapat 3 Indikator Kinerja sasaran yang sudah dijelaskan pada beberapa poin diatas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2025. Analisis capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Tahun 2025 TW IV

No	Tujuan /	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio Jalan Provinsi	0,390	0,371	105,12
			2. Rata – rata load factor angkutan umum	71	83,94	118,23
2		Meningkatnya Layanan Transportasi	3. Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	0,634	0,650	102,52

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam urusan Perhubungan dan Urusan Penunjang masuk katagori sangat baik.

3.3.2 Perbandingan Target IKU Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2030

No	Tujuan /	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target 2030
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio Jalan Provinsi	0,390	0,371	105,12	0,381
			2. Rata – rata load factor angkutan umum	71	83,94	118,23	73,50
2		Meningkatnya Layanan Transportasi	3. Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	0,634	0,650	102,52	0.760

3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	1. Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.702	4.543	123
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1	1	100
			3. Jumlah Terminal Type B	8	7	88
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Jumlah Arus Penumpang Kereta Api	2.232.658	1.053.637	47
			5. Jumlah Arus Penumpang Kapal Laut	68.648	19.558	28
			6. Jumlah Arus Penumpang Bus AKDP	1.776.105	884.236	50
			7. Load Faktor Angkutan Darat	60	51	85
			8. Load Faktor Angkutan Laut	49	39	80
			9. Load Faktor Angkutan Kereta Api	45	10	22
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	10. Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	8	10	125
			11. Persentase Tingkat Fatalitas	5	6	120

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 - 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,6	0,6	100	0,62	0,51	82,26
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1	1	100	1	1	100
			3. Jumlah Terminal Type B	8	7	87,5	7	7	100
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63	63	100	52,75	51,97	98,52
			5. On Time Performance Layanan Transportasi	51	51	100	65	64	98,46
			6. Load faktor penumpang kereta api	48	42	87,5	45	44	97,78
			7. Load faktor penumpang kapal laut	42	42	100	43	44	102,23
			8. Load faktor penumpang Bus AKDP	65	62	95,4	67	66	98,51
			9. Load faktor angkutan barang darat	62	65	104,8	66	65	98,48
			10. Load faktor angkutan barang laut	51	57	111,8	52	52	100
			11. Load faktor angkutan barang kereta api	47	81	172,3	49	49	100
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,318	0,310	102,6	0,304	0,26	85,53

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 - 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,681	0,608	89	0,690	0,629	91
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1	1	100,00	2	1	50,00
			3. Jumlah Terminal Type B	7	7	100,00	7	7	100,00
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	68,92	85,81	124	69,10	86,09	124
			5. On Time Performance Layanan Transportasi	52,75	71	118	57,80	75	129
			6. Load faktor penumpang kereta api	48	65	135	80	75	93,75
			7. Load faktor penumpang kapal laut	45	42	93,33	9	20	222,22
			8. Load faktor penumpang Bus AKDP	69	50,60	73,33	70	64	91,43
			9. Load faktor angkutan barang darat	68	62,05	91,25	69	63	91,30
			10. Load faktor angkutan barang laut	54	54	100	55	62,35	113,36
			11. Load faktor angkutan barang kereta api	53	106	200	54	94,62	175,32
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,301	0,320	98	0,392	0,390	100,51

Capaian kinerja pada sektor transportasi selama tahun 2023–2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan pada berbagai indikator strategis yang terkait dengan konektivitas, kelancaran distribusi angkutan, peningkatan pelayanan, dan keselamatan transportasi di Provinsi Sumatera Selatan.

1. Peningkatan Konektivitas Transportasi

Indikator **Rasio Konektivitas Transportasi** menunjukkan kinerja positif. Pada tahun 2023, target sebesar 0,681 dengan realisasi 0,608 menghasilkan capaian 89%. Tahun 2024 mengalami peningkatan, di mana realisasi mencapai 0,629 dari target 0,690 atau capaian sebesar 91%. Hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas dan keterhubungan antarwilayah terus membaik serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

2. Meningkatnya Simpul Transportasi

Peningkatan simpul transportasi juga memperlihatkan tren positif.

- **Pelabuhan Laut Penumpang Regional** menunjukkan capaian 100% pada 2023 (target 1, realisasi 1). Tahun 2024 meningkat menjadi realisasi 2 dari target 2 (capaian 50%), yang menunjukkan adanya penambahan fasilitas namun belum mencapai target penuh.
- **Terminal Tipe B**, baik pada 2023 maupun 2024, menunjukkan capaian 100% dengan realisasi yang konsisten memenuhi target (7 terminal). Konsistensi ini mencerminkan kesiapan simpul transportasi darat dalam mendukung layanan antarkota.

3. Kualitas Layanan Transportasi

Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terus menunjukkan tren sangat baik. Pada tahun 2023, IKM mencapai 124% (target 68,92; realisasi 85,81). Tahun 2024 capaian tetap tinggi yaitu 124% (target 69,10; realisasi 86,09). Hal ini menggambarkan penerimaan yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diberikan.

Indikator **On Time Performance (OTP)** juga mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2023 capaian OTP sebesar 118% dan

meningkat lagi pada tahun 2024 dengan capaian 129%. Kenaikan ini menunjukkan membaiknya ketepatan waktu layanan angkutan dan peningkatan keandalan transportasi publik.

4. Keseimbangan Kebutuhan Angkutan

Indikator load factor pada berbagai moda angkutan mengalami fluktuasi tetapi secara umum menunjukkan peningkatan efisiensi:

- **Kereta Api (penumpang)** meningkat dari capaian 135% (2023) menjadi 93,75% (2024).
- **Kapal Laut Penumpang** melonjak tajam pada 2024 dengan capaian 222,22%, dari 93,33% pada 2023.
- **Bus AKDP** stabil dengan capaian 73,7% (2023) dan 91,43% (2024).
- **Angkutan barang darat** menunjukkan perbaikan signifikan dari 91,21% (2023) menjadi 93,10% (2024).
- **Angkutan barang laut** meningkat dari 100% menjadi 113,36%.
- **Angkutan barang kereta api** naik drastis dari capaian 90% (2023) menjadi 175,32% (2024).

Secara keseluruhan, load factor menunjukkan peningkatan pemanfaatan sarana transportasi, baik angkutan penumpang maupun barang, yang berdampak langsung pada efisiensi operasional dan produktivitas distribusi logistik.

5. Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas

Indikator **V/C Rasio Jalan Provinsi**, yang menilai tingkat kejenuhan jalan, menunjukkan hasil sangat baik. Pada 2023, capaian indikator mencapai 98% (target 0,301; realisasi 0,320). Pada 2024 capaian meningkat hingga 100,51% (target 0,392; realisasi 0,390).

Capaian ini menandakan bahwa upaya pengelolaan kapasitas jalan dan pengurangan kemacetan telah berjalan baik, meskipun tetap perlu perhatian agar rasio tidak terus meningkat yang dapat berdampak pada menurunnya kinerja lalu lintas.

Secara umum, tahun 2023–2024 menunjukkan capaian yang **baik hingga sangat baik** pada sebagian besar indikator kinerja sektor transportasi. Peningkatan terjadi pada aspek konektivitas, kualitas layanan, serta efisiensi angkutan penumpang dan barang. Namun, beberapa indikator seperti pelabuhan pengumpan dan load factor moda tertentu perlu mendapatkan perhatian lanjutan untuk meningkatkan pencapaian target secara maksimal.

Penguatan koordinasi, peningkatan infrastruktur, dan optimalisasi pelayanan akan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja transportasi di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio Jalan Provinsi	0,390 Rasio	0,371 Rasio	105,12
			2. Rata – rata load factor angkutan umum	71%	83,94 %	118,23
		Meningkatnya Layanan Transportasi	3. Rasio Konektiivtas Transportasi Provinsi	0,634 Rasio	0,650 Rasio	102,52

Pada Tahun 2025, capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung tujuan *meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas* dan *meningkatnya layanan transportasi* secara umum menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator V/C Rasio Jalan Provinsi, realisasi kinerja mencapai 0,371, lebih baik dibandingkan target sebesar 0,390, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,12%. Capaian ini mencerminkan kondisi kinerja lalu lintas pada jaringan jalan provinsi yang relatif terkendali, serta menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pemanfaatan kapasitas jalan sebagai hasil dari upaya pengelolaan lalu lintas dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

Selanjutnya, indikator Rata-rata *load factor* angkutan umum pada Tahun 2025 mencatat realisasi sebesar 83,94%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 71%, dengan capaian kinerja 118,23%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat tingkat keterisian penumpang angkutan umum berada pada kondisi yang cukup baik. Namun demikian, capaian tersebut masih dihadapkan pada adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan antar moda transportasi, di mana sebagian moda memiliki tingkat keterisian yang tinggi, sementara moda lainnya masih relatif rendah. Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan integrasi layanan dan pemerataan pemanfaatan angkutan umum ke depan.

Sementara itu, indikator Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi terealisasi sebesar 0,650, melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,634, dengan tingkat capaian kinerja 102,52%. Capaian ini menunjukkan meningkatnya keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi provinsi, yang mendukung mobilitas orang dan barang serta memperkuat konektivitas wilayah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai bahkan melampaui rencana, meskipun ke depan masih diperlukan upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan transportasi, khususnya dalam rangka mengurangi ketimpangan pemanfaatan antar moda dan memperkuat integrasi sistem transportasi provinsi.

Untuk mengetahui tingkat Capaian Kinerja Terhadap Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis

No	Tujuan /	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio Jalan Provinsi	0,371	0,390	105,12
2			2. Rata – rata load factor angkutan umum	83,94	71	118,23
3		Meningkatnya Layanan Transportasi	3. Rasio Konektiivtas Transportasi Provinsi	0,650	0,634	102,52

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan pembangunan sektor transportasi Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Seluruh indikator kinerja utama, yaitu V/C Rasio Jalan Provinsi, rata-rata *load factor* angkutan umum, dan rasio konektivitas transportasi provinsi, berhasil mencapai capaian di atas 100 persen. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan infrastruktur jalan, pemanfaatan angkutan umum, serta keterhubungan antarwilayah.

Meskipun demikian, capaian kinerja tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan pemanfaatan antar moda transportasi, khususnya pada layanan angkutan umum. Oleh karena itu, ke depan diperlukan langkah strategis yang lebih terarah untuk meningkatkan integrasi antarmoda, pemerataan layanan, serta optimalisasi moda transportasi dengan tingkat pemanfaatan yang masih rendah. Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 dapat menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan sistem transportasi provinsi pada periode berikutnya.

3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kementerian Perhubungan

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian. Untuk Tahun 2025 Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Kementerian Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan						Kementerian Perhubungan					
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2025**	**Capaian (%)**	**No**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**	**Realisasi Tahun 2025**	**Capaian (%)**
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas	1. V/C Rasio Jalan Provinsi	0,390	0,371	105,12	1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	1. Rasio Konektivitas Transportasi Nasional	0,82	0,695	84,76
		2. Rata – rata load factor angkutan umum	71	83,94	118,23	2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	2. Tingkat Integrasi Transportasi Nasional	0,6	0,5	83,33
						3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi nasional	90	95,69	106,32
2	Meningkatnya Layanan Transportasi	**3.** Rasio Konektivitas	0,634	0,650	102,52			4. Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional	99,998	83,457	83,46

Sinkronisasi Indikator Kinerja Dinas Perhubungan dan Kementerian Perhubungan:

1. V/C Rasio disinkronkan dengan Tingkat Integrasi Transportasi Nasional dan Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional

   V/C Rasio Jalan Provinsi menggambarkan tingkat pelayanan dan kapasitas jaringan jalan. Kondisi jalan yang lancar dan tidak jenuh mendukung kelancaran pergerakan antar moda dan antarwilayah, sehingga memperkuat integrasi sistem transportasi nasional. Selain itu, tingkat kejenuhan jalan yang terkendali berkontribusi terhadap penurunan risiko kecelakaan lalu lintas, sehingga turut mendukung peningkatan keselamatan transportasi nasional.

2. Rata – rata Load Factor Angkutan Umum disinkronkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Nasional

   Rata-rata load factor angkutan umum mencerminkan tingkat pemanfaatan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi. Semakin optimal load factor, menunjukkan bahwa layanan angkutan umum semakin diminati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi nasional.

3. Rasio Konektivitas disinkronkan dengan Rasio Konektivitas Transportasi Nasional

   Rasio Konektivitas di tingkat provinsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rasio Konektivitas Transportasi Nasional. Peningkatan konektivitas antarwilayah di provinsi secara langsung mendukung peningkatan keterhubungan jaringan transportasi nasional secara keseluruhan.

4. Secara keseluruhan, indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja Kementerian Perhubungan. Rasio Konektivitas Provinsi mendukung Rasio Konektivitas Transportasi Nasional, V/C Rasio Jalan Provinsi mendukung integrasi dan keselamatan transportasi nasional, serta rata-rata load factor angkutan umum mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi nasional. Dengan demikian, kinerja transportasi di tingkat provinsi berperan strategis dalam pencapaian sasaran dan indikator transportasi nasional.

3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.20 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas		1. V/C Rasio Jalan Provinsi	0,390	0,371	105,12	Masih terdapat ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi yang memengaruhi nilai V/C rasio jalan provinsi. Pengaturan lalu lintas pada sebagian ruas jalan mampu menekan tingkat kejenuhan lalu lintas	Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan nilai V/C rasio jalan provinsi antara lain melalui penguatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas dengan volume lalu lintas tinggi, seperti pengaturan simpang, pengendalian arus lalu lintas pada jam puncak, serta optimalisasi fungsi rambu dan marka jalan. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan titik rawan kemacetan serta pengaturan operasional angkutan barang agar tidak terkonsentrasi pada waktu tertentu, sehingga tingkat kejenuhan lalu lintas dapat ditekan.
			2. Rata – rata load factor angkutan umum	71	83,94	118,23	Tingkat keterisian angkutan umum belum merata pada seluruh trayek dan moda Tingginya Keterisian pada moda dan trayek tertentu meningkatkan nilai rata- rata load factor	Untuk mengatasi belum meratanya keterisian angkutan umum pada seluruh trayek dan moda, dilakukan penataan kembali jaringan trayek angkutan umum sesuai dengan kebutuhan permintaan masyarakat. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas layanan angkutan umum melalui perbaikan jadwal, peningkatan kenyamanan dan keamanan, serta penguatan pengawasan operasional. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemerataan tingkat keterisian angkutan umum sekaligus meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

2		Meningkatnya Layanan Transportasi	3. Rasio Konektivitas Transportasi	0,634	0,650	102,52	Keterhubungan layanan transportasi antar wilayah belum optimal	Dalam rangka meningkatkan keterhubungan layanan transportasi antarwilayah, dilakukan pengembangan dan penguatan layanan transportasi pada koridor-koridor utama serta peningkatan keterpaduan antar moda transportasi. Selain itu, dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi, terutama pada wilayah yang masih belum terlayani secara optimal. Upaya tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan transportasi dan meningkatkan rasio konektivitas transportasi provinsi secara berkelanjutan.
							Meningkatnya keterhubungan antar wilayah melalui berfungsinya layanan transportasi pada beberapa moda dan koridor utama sehingga rasio konektivitas transportasi provinsi dapat tercapai dan melampaui target.	

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Perhubungan yg telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 bisa terlihat pada Tabel 3.21 sebagaimana berikut :

Tabel 3.21 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas	1. V/C Rasio Jalan Provinsi	105,12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-Konektivitas Darat -Persentase Jumlah Perlengakapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal**	**60 51**	Menunjang
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia**	**6 Unit**	Menunjang
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit	Menunjang
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**	**1 Laporan**	Menunjang
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	Menunjang
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Menunjang

			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Menunjang
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	**Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	1 Laporan	Menunjang
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	Menunjang
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**	1 Laporan	Menunjang
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	Menunjang
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Menunjang
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	Menunjang
	2. Rata - rata load factor angkutan umum	118,23	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Konektivitas Laut**	**31%**	Menunjang
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau**	100%	Menunjang

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
			Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Unit	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani**	**80%**	Menunjang
			Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	1 Dokumen	Menunjang
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
			Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	**Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	Menunjang
			Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	0	Menunjang

			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
			Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus**	1 Dokumen	Menunjang
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	Menunjang
Meningkatnya Layanan Transportasi	3. Rasio Konektivitas Transportasi	102,52	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-Konektivitas Darat** **-Persentase Jumlah Perlengakapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal**	**60** **51**	Menunjang
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Menunjang

			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	1 Dokumen	Menunjang
			Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkoktaan untuk Aangkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampauai Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum**	1 Dokumen	Menunjang
			Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebiajakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Konektivitas Laut**	**31%**	Menunjang
			Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	1 Unit	Menunjang
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	Menunjang

			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**-Konektivitas Darat -Persentase Jumlah Perlengakapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal**	**60 51**	Menunjang
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum**	6 Unit	Menunjang
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	Menunjang
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Unit	Menunjang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan**	4 Unit	Menunjang
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	Menunjang
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	2 Laporan	Menunjang

			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Menunjang
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Konektivitas Laut**	**31%**	Menunjang
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	1 Dokumen	Menunjang
			Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Menunjang
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	1 Dokumen	Menunjang

			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barng, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**-Konektivitas Darat** **-Persentase Jumlah Perlengakapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal**	**60** **51**	Menunjang
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola	7 Terminal	Menunjang
			Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 Terminal	Menunjang
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Terminal	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Konektivitas Laut**	**31%**	Menunjang
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKp**	2 Dokumen	Menunjang

			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	Menunjang
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun	100%	Menunjang
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Menunjang
			Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	Menunjang
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	Menunjang
			Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan**	2 Laporan	Menunjang
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	Menunjang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	Menunjang
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BMD yang tersedia	1 Unit	Menunjang
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	Menunjang

Tabel 3.31 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
1	*2*	*7*	*8*	*9*
I	**Bidang Perhubungan**	**70.866.344.997**	**60.647.614.594**	**85,58**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**42.285.846.437**	**37.040.184.299**	**87,59**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**657.500.000**	**343.124.250**	**52,19**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	452.500.000	277.413.000	61,31
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	4.900.000	16,33
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	14.400.000	48,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000	16.010.000	45,74
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000	19.780.000	65,93
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	0	0,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	10.621.250	21,24
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**23.558.030.353**	**21.357.938.692**	**90,66**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.058.808.000	20.914.214.042	90,70
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	414.222.353	414.113.000	99,97
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	9.282.420	26,52
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.000.000	14.734.730	58,94
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	5.594.500	22,38

III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**332.500.000**	**189.060.762**	**56,86**
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0,00
14	Pengamanan Barng Milik Daerah	207.500.000	110.515.962	53,26
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00
17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	125.000.000	78.544.800	62,84
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**511.110.250**	**234.362.201**	**45,85**
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.500.000	21.547.000	66,30
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	282.500.000	81.866.500	28,98
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	156.110.250	104.761.560	67,11
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	26.187.141	65,47
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**945.500.000**	**860.543.193**	**91,01**
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	40.000.000	100,00
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.000.000	56.410.200	92,48
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0,00
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0,00
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	120.000.000	109.663.180	91,39
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	1.680.000	14,00
28	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000	99.895.450	99,90
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	49.331.000	49,33

30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.500.000	484.226.971	98,32
31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	19.336.392	96,68
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.490.000.000**	**1.489.785.000**	**99,99**
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00
33	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.490.000.000	1.489.785.000	99,99
34	Pengadaan Mebel	0	0	0,00
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.616.251.000**	**6.234.487.399**	**81,86**
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000	2.908.500	29,09
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	768.000.000	571.796.899	74,45
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.838.251.000	5.659.782.000	82,77
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.385.353.950**	**2.190.092.878**	**91,81**
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.500.000	172.227.995	76,38
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	611.500.000	511.560.185	83,66
40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	285.000.000	283.642.336	99,52
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	100.000.000	98.790.000	98,79
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	295.190.962	98,40

43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	633.353.950	619.161.350	97,76
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.000.000	209.520.050	91,10
IX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**4.789.600.884**	**4.140.789.924**	**86,45**
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.789.600.884	4.140.789.924	86,45
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**16.407.902.510**	**12.238.750.824**	**74,59**
I	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**0**	**0**	**0,00**
46	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0	0	0,00
II	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**5.702.161.710**	**4.165.926.137**	**73,06**
47	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.702.161.710	4.165.926.137	73,06
III	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**7.456.000.000**	**6.855.858.570**	**91,95**
48	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6.908.500.000	6.327.656.564	91,59
49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	547.500.000	528.202.006	96,48
IV	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**562.000.800**	**379.214.912**	**67,48**
50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	472.000.800	337.557.682	71,52
51	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	90.000.000	41.657.230	46,29

V	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**27.900.000**	**0**	**0,00**
52	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	27.900.000	0	0,00
VI	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**250.000.000**	**149.460.980**	**59,78**
53	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	100.000.000		0,00
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	150.000.000	149.460.980	99,64
55	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	0	0	0,00
VII	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.862.500.000**	**233.911.190**	**12,56**
56	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	165.000.000	132.099.337	80,06
57	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.697.500.000	101.811.853	6,00
VIII	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**0**	**0**	**0,00**
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	0	0	0,00

IX	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampauai Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**405.000.000**	**356.545.855**	**88,04**
59	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	405.000.000	356.545.855	88,04
X	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**142.340.000**	**97.833.180**	**68,73**
60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	142.340.000	97.833.180	68,73
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**11.653.737.500**	**10.922.907.960, 00**	**93,73**
I	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**638.997.500**	**600.723.424**	**94,01**
61	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	638.997.500	600.723.424	94,01
II	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**228.730.000**	**206.472.900**	**90,27**

62	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	228.730.000	206.472.900	90,27
III	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas**	**108.155.000**	**97.810.299**	**90,44**
63	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	108.155.000	97.810.299	90,44
IV	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**952.040.000**	**947.433.033**	**99,52**
64	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	952.040.000	947.433.033	99,52
V	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**8.669.720.000**	**8.110.088.197**	**93,54**

65	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	53.320.000	50.571.389	94,85
66	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	7.825.000.000	7.376.769.165,00	94,27
67	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	791.400.000	682.747.643	86,27
VI	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**696.095.000**	**659.467.934**	**94,74**
68	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	191.365.000	175.039.750	91,47
69	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	504.730.000	484.428.184	95,98
VII	**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**360.000.000**	**300.912.173**	**83,59**
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	360.000.000	300.912.173	83,59
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**518.858.550**	**445.771.511**	**85,91**
I	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**358.497.000**	**334.843.852**	**93,40**
71	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	358.497.000	334.843.852	93,40

II	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**106.493.650**	**69.464.911**	**65,23**
72	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	0	0	0,00
73	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	106.493.650	69.464.911	65,23
III	**Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**53.867.900**	**41.462.748**	**76,97**
74	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	53.867.900	41.462.748	76,97
	Jumlah	**70.866.344.997**	**60.647.614.594**	**85,58**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Perencanaan program dan kegiatan yang disusun secara terarah dan selaras dengan sasaran strategis serta indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja.
b. Penetapan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas sehingga memudahkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja.

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sehingga permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
d. Terjalinnya koordinasi dan sinergi yang baik antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan maupun dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, antara lain:

a. Penetapan target pada beberapa indikator kinerja masih perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan kondisi riil dan didukung oleh data historis (data series) minimal lima tahun.
b. Analisis terhadap capaian indikator kinerja perlu diperkuat dengan membandingkan realisasi tahun berjalan terhadap target jangka menengah Renstra dan realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga tren kinerja dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.
c. Keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan anggaran masih perlu diperkuat agar efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dan dijelaskan secara lebih jelas.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, upaya penyempurnaan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya meliputi:

a. Melakukan reviu terhadap target indikator kinerja dengan mempertimbangkan data capaian lima tahun terakhir, target Renstra, serta potensi pencapaian pada tahun berikutnya.
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sehingga setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian indikator Rasio Konektivitas Transportasi, Rata-rata Load Factor Angkutan Umum, dan V/C Ratio Jalan Provinsi.
c. Memperkuat monitoring dan evaluasi secara triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut apabila terdapat deviasi capaian kinerja.

d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, operator transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan konektivitas transportasi, kualitas pelayanan angkutan umum, serta kelancaran lalu lintas pada ruas jalan provinsi.
e. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyempurnaan Renja, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan anggaran pada tahun berikutnya sehingga tercipta kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

3.3.6 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah termasuk Prestasi Kerja yang dicapai atas Penggunaan Anggaran. Prestasi Kerja yang dimaksud disini adalah kinerja yang didefinisikan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / Program yang hendak dicapai sehubungan dengan Penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk pencapaian kinerja terbaik tentunya memerlukan analisa yang tepat, menyangkut Sumber Daya yang ada, antara lain:

a. Sumber Daya Manusia.

b. Sumber Dana / Anggaran.

Analisis dari efisiensi sumber daya dari kondisi yang ada saat ini di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan :

a. Sumber Daya Manusia.

1) Dalam hal pengelolaan SDM, harus mendapat perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Sehingga pendistribusian pegawai sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang-bidang yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja.
2) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.

3) Masih kurangnya tenaga yang kompeten harus diminimalisir dengan memperbanyak kuantitas (volume) diklat – diklat teknis yang berkesesuaian dengan kebutuhan kerja.
4) Terkait kebutuhan tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimana dari tahun 2023 telah dilakukan Penerimaan ASN sebanyak 37 Orang dan sudah bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia – STTD.

b. Sumber Dana / Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis melalui keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp70.866.344.997, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp56.215.127.924 dan Belanja Modal sebesar Rp14.651.217.073**.** Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai Rp60.647.614.594 atau 85,58%**,** dengan rincian realisasi Belanja Operasi sebesar Rp47.931.365.758 (85,26%) dan Belanja Modal sebesar Rp12.716.248.836 (86,79%)**.**

Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas" melalui pelaksanaan program yang secara langsung berkontribusi terhadap indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indikator Rasio Konektivitas Transportasi didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Program Pengelolaan Pelayaran**.** Kedua program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi jalan, penyelenggaraan

manajemen dan rekayasa lalu lintas, peningkatan pelayanan angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta peningkatan pelayanan kepelabuhanan. Pelaksanaan program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan keterhubungan antarwilayah dan aksesibilitas pelayanan transportasi di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Indikator V/C Ratio Jalan Provinsi didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**,** melalui kegiatan survei lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional lalu lintas, peningkatan keselamatan transportasi jalan, serta pembinaan penyelenggaraan angkutan jalan.
3. Indikator Rata-rata Load Factor Angkutan Umum didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**,** Program Pengelolaan Perkeretaapian**,** dan Program Pengelolaan Pelayaran, melalui kegiatan survei load factor, pembinaan angkutan umum, monitoring pelayanan angkutan jalan, kereta api, LRT, dan angkutan laut, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan transportasi antarmoda.

Pelaksanaan program-program tersebut menghasilkan capaian kinerja yang optimal. Rasio Konektivitas Transportasi mencapai realisasi 0,650 dari target 0,634 atau sebesar 102,52%. V/C Ratio Jalan Provinsi terealisasi sebesar 0,371 dari target 0,390 atau mencapai 105,12%**.** Selain itu, Rata-rata Load Factor Angkutan Umum juga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi anggaran sebesar 85,58%, seluruh indikator kinerja utama mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara efisien. Efisiensi dicapai melalui optimalisasi penggunaan anggaran pada program-program yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, pengendalian pelaksanaan

anggaran secara berkala, penetapan prioritas kegiatan yang berorientasi pada hasil, serta penguatan koordinasi antarbidang dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penggunaan anggaran yang belum mencapai 100 persen tidak mengurangi kualitas capaian kinerja, bahkan mampu menghasilkan kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.32 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efesiensi %
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas		V/C Rasio Jalan Provinsi	0,390	0,371	105,12	48.265.908.147	41.355.571.416	85,68	0,14
		Rata - rata load factor angkutan umum	71	75,94	106,96	43.500.799.987	38.145.423.744	87,69	0,12
	Meningkatnya Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi	0,634	0,650	102,52	26.175.084.184	22.327.593.657	85,30	0,15

3.3.7 Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.33 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Tahun 2025					
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Tingkat Efesiensi (%)
						(Rp)	Capaian (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	**Bidang Perhubungan**				**70.866.344.997**	**60.647.614.594**	**85,58**	**0,14**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi**	**92%**	**100%**	**42.285.846.437**	**37.040.184.299**	**87,59**	**0,12**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**657.500.000**	**343.124.250**	**52,19**	**0,48**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	452.500.000	277.413.000	61,31	**0,39**

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	4.900.000	16,33	**0,84**
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	14.400.000	48,00	**0,52**
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	16.010.000	45,74	**0,54**
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	19.780.000	65,93	**0,34**
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	0	0,00	**1,00**

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	10.621.250	21,24	**0,79**
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**23.558.030.353**	**21.357.938.692**	**90,66**	**0,09**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	138 Orang/Bulan	23.058.808.000	20.914.214.042	90,70	**0,09**
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.222.353	414.113.000	99,97	**0,00**
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	9.282.420	26,52	**0,73**
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	14.734.730	58,94	**0,41**
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	5.594.500	22,38	**0,78**

III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**332.500.000**	**189.060.762**	**56,86**	**0,43**
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	0	0	0,00	**0,00**
14	Pengamanan Barng Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	207.500.000	110.515.962	53,26	**0,47**
15	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	0	0	0,00	**0,00**
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	0	0	0,00	**0,00**
17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	78.544.800	62,84	**0,37**
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis**	**215 Orang**	**215 Orang**	**511.110.250**	**234.362.201**	**45,85**	**0,54**
18	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	32.500.000	21.547.000	66,30	**0,34**

19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	282.500.000	81.866.500	28,98	**0,71**
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		156.110.250	104.761.560	67,11	**0,33**
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		40.000.000	26.187.141	65,47	**0,35**
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**945.500.000**	**860.543.193**	**91,01**	**0,09**
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	40.000.000	40.000.000	100,00	**0,00**
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	61.000.000	56.410.200	92,48	**0,08**

24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	-	0	0	0,00	**0,00**
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Paket	-	0	0	0,00	**0,00**
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	120.000.000	109.663.180	91,39	**0,09**
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	1.680.000	14,00	**0,86**
28	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	99.895.450	99,90	**0,00**
29	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	49.331.000	49,33	**0,51**
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	492.500.000	484.226.971	98,32	**0,02**

31	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	19.336.392	96,68	**0,03**
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Tersedia**	**13 Unit**	**5 unit**	**1.490.000.000**	**1.489.785.000**	**99,99**	**0,00**
32	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	8 Unit	-	0	0	0,00	**0,00**
33	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	5 Unit	1.490.000.000	1.489.785.000	99,99	**0,00**
34	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	-	0	0	0,00	**0,00**
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**7.616.251.000**	**6.234.487.399**	**81,86**	**0,18**
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.908.500	29,09	**0,71**
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	768.000.000	571.796.899	74,45	**0,26**

37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	6.838.251.000	5.659.782.000	82,77	**0,17**
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah BMD yang Terpelihara**	**460 Unit**	**460 Unit**	**2.385.353.950**	**2.190.092.878**	**91,81**	**0,08**
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	225.500.000	172.227.995	76,38	**0,24**
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	611.500.000	511.560.185	83,66	**0,16**
40	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	285.000.000	283.642.336	99,52	**0,00**
41	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000	98.790.000	98,79	**0,01**
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	295.190.962	98,40	**0,02**

43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	633.353.950	619.161.350	97,76	**0,02**
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	412 Unit	412 Unit	230.000.000	209.520.050	91,10	**0,09**
IX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BMD yang tersedia**	**1 Unit**	**1 Unit**	**4.789.600.884**	**4.140.789.924**	**86,45**	**0,14**
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja	1 Unit kerja	4.789.600.884	4.140.789.924	86,45	**0,14**
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan**	**0.720 Rasio**		**16.407.902.510**	**12.238.750.824**	**74,59**	**0,25**
I	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia**	**1 Dokumen**	-	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	-	0	0	0,00	**0,00**

II	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia**	**6 Unit**	**6 Unit**	**5.702.161.710**	**4.165.926.137**	**73,06**	**0,27**
47	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit	6 Unit	5.702.161.710	4.165.926.137	73,06	**0,27**
III	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**Jumlah terminal tipe B yang dikelola**	**7 Terminal**	**7 Terminal**	**7.456.000.000**	**6.855.858.570**	**91,95**	**0,08**
48	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	7 Terminal	7 Terminal	6.908.500.000	6.327.656.564	91,59	**0,08**
49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Terminal	2 Terminal	547.500.000	528.202.006	96,48	**0,04**
IV	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**562.000.800**	**379.214.912**	**67,48**	**0,33**
50	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	472.000.800	337.557.682	71,52	**0,28**

51	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	41.657.230	46,29	**0,54**
V	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lints (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**	**1 Laporan**	**-**	**27.900.000**	**0**	**0,00**	**1,00**
52	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	-	27.900.000	0	0,00	**1,00**
VI	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**250.000.000**	**149.460.980**	**59,78**	**0,40**
53	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	-	100.000.000		0,00	**1,00**
54	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	149.460.980	99,64	**0,00**

55	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	-	0	0	0,00	**0,00**
VII	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum**	**6 Unit**		**1.862.500.000**	**233.911.190**	**12,56**	**0,87**
56	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	165.000.000	132.099.337	80,06	**0,20**
57	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Unit	-	1.697.500.000	101.811.853	6,00	**0,94**

VIII	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan**	**1 Dokumen**	**-**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkoktaan untuk Aangkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	-	0	0	0,00	**0,00**
IX	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampauai Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**405.000.000**	**356.545.855**	**88,04**	**0,12**
59	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebiajakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	405.000.000	356.545.855	88,04	**0,12**

X	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan**	**4 Unit**	**4 Unit**	**142.340.000**	**97.833.180**	**68,73**	**0,31**
60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	4 Unit	142.340.000	97.833.180	68,73	**0,31**
III	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Jumlah Trip Perjalanan Kapal**	**3.702 Trip**	**3.702 Trip**	**11.653.737.500**	**10.922.907.960,00**	**93,73**	**0,06**
I	**Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Provinsi yang Bersangkutan**	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	**1 Unit**	**1 Unit**	**638.997.500**	**600.723.424**	**94,01**	**0,06**

61	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	1 Unit	1 Unit	638.997.500	600.723.424	94,01	**0,06**
II	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**228.730.000**	**206.472.900**	**90,27**	**0,10**
62	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan disetujui Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	228.730.000	206.472.900	90,27	**0,10**

III	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas**	**Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**108.155.000**	**97.810.299**	**90,44**	**0,10**
63	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Terkait Baerupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barng, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	108.155.000	97.810.299	90,44	**0,10**

IV	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKr/DLKp**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**952.040.000**	**947.433.033**	**99,52**	**0,00**
64	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Dokumen	2 Dokumen	952.040.000	947.433.033	99,52	**0,00**
V	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang dibangun**	**50%**	**100%**	**8.669.720.000**	**8.110.088.197**	**93,54**	**0,06**
65	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	1 Dokumen	53.320.000	50.571.389	94,85	**0,05**
66	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	7.825.000.000	7.376.769.165,00	94,27	**0,06**

67	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	791.400.000	682.747.643	86,27	**0,14**
VI	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**696.095.000**	**659.467.934**	**94,74**	**0,05**
68	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	191.365.000	175.039.750	91,47	**0,09**
69	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Dokumen	504.730.000	484.428.184	95,98	**0,04**
VII	**Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional**	**Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**360.000.000**	**300.912.173**	**83,59**	**0,16**

70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	1 Laporan	360.000.000	300.912.173	83,59	**0,16**
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Jumlah Penumpang Kereta Api**	**2.126.341 Orang**	**4.626.481 Orang**	**518.858.550**	**445.771.511**	**85,91**	**0,14**
I	**Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**358.497.000**	**334.843.852**	**93,40**	**0,07**
71	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kerta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	358.497.000	334.843.852	93,40	**0,07**
II	**Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**106.493.650**	**69.464.911**	**65,23**	**0,35**

72	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen		0	0	0,00	**0,00**
73	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	106.493.650	69.464.911	65,23	**0,35**
III	**Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**53.867.900**	**41.462.748**	**76,97**	**0,23**

74	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	53.867.900	41.462.748	76,97	**0,23**
	Jumlah				**70.866.344.997**	**60.647.614.594**	**85,58**	**0,14**

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dari Pagu Anggaran yang tersedia, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 4 (empat) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan yang Total Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 70.866.344.997,- (Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujug Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian :
    - Belanja Pegawai dengan Pagu Dana sebesar Rp.23.058.808.000,-, terealisasi sebesar Rp. 20.909.840.442,- dengan persentase 90,68 %.
    - Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 31.856.319.924,-, terealisasi sebesar Rp. 27.021.525.316,- dengan persentase 84,82 %.
    - Belanja Subsisi sebesar Rp. 1.300.000.000,- terealsiasi 0 degan persentase 0%
- Belanja Modal sebesar Rp. 14.651.217.073,-, terealisasi sebesar Rp. 12.716.248.836,- dengan persentase 86,79 %.

Realisasi Anggaran Total Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 60.647.614.594,- atau 85,58% dengan realisasi fisik sebesar 99,78% adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 42.285.846.437- terealisasi sebesar Rp. 37.040.184.299,- dengan persentase sebesar 87,59%, dan sisa anggaran sebesar Rp.5.245.662.138,-

Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 657.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 343.124.250,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 52,19% dan Realisasi fisik 95,44%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp.23.558.030.353,- terealisasi sebesar Rp.21.357.938.692,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 90,66% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 bulan.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 332.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 189.060.762,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 56,86% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 511.110.250,- terealisasi sebesar Rp. 234.362.201,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 45,85% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 945.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 860.543.193,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,01% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.490.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.489.785.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,99% dan realisasi fisik 100 %. Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya Barang Milik Daerah.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 7.616.251,000,- terealisasi sebesar Rp.6.234.487.399,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 81,86% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp.2.385.353,950,- terealisasi sebesar Rp.2.190.092.878,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,81% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah

terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

9. Peningkatan Pelayanan BLUD, dengan Pagu dan sebesar Rp. 4.789.600.884,- terealisasi sebesar Rp.4.140.789.924,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 86,45% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya peningkatan Pelayanan BLUD.

I. 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.407.902.510,- terealisasi sebesar Rp.12.238.750.824 ,- dengan persentase sebesar 74,59%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.169.151.686,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp.5.702.161.710,- terealisasi sebesar Rp.4.165.926.137,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 73,06% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan pagu dana sebesar Rp. 7.456.000.000,- terealisasi sebesar Rp.6.855.858.570,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 91,95% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B.
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 562.000.800,- terealisasi sebesar Rp.379.214.912,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 67,48% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi, dengan Pagu dana sebesar Rp.27.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan Persentase realisasi keuangan sebesar 0% dan Realisasi fisik 0%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (andalalin) untuk jalan Provinsi.

5. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp.149.460.980,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 59,78% dan Realisasi fisik 60%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi.
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.862.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 233.911.190,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 12,56% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
7. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, dengan pagu dana sebesar Rp. 405.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 356.545.855,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 88,04% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota.
8. Penertiban Izin Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Dengan Pagu dana Sebesar Rp. 142.340.000,- terealisasi Rp.97.833.180,- dengan Persentase Realisasi Keuangan sebesar 68,73% dan realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penertiban Izin Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 11.653.737.500,- terealisasi sebesar Rp. 10.922.907.960,- dengan persentase sebesar 93,73%, dan sisa anggaran sebesar Rp.730.829.540,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan dengan pagu dana

sebesar Rp. 638.997.500,- terealisasi sebesar Rp. 600.723.424,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,01% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan.

2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan Pagu dana sebesar Rp. 228.730.000,- terealisasi sebesar Rp.206.472.900,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 90,27% dan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Penertiban Izin usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Terkait dengan Angkutan laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas, dengan Pagu dana sebesar Rp. 108.155.000,- terealisasi sebesar Rp.97.810.299,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 90,44% dan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penertiban Izin usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Terkait dengan Angkutan laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas.
4. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan Pagu dana sebesar Rp. 952.040.000.000,- terealisasi sebesar Rp.947.433.033,- dengan presentase realisasi keuangan sebesar 99,52% dan realisasi fisik sebesar 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.

5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan pagu dana sebesar Rp.8.669.720.000,- terealisasi sebesar Rp.8.110.088.197,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,54% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
6. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 696.095.000,- terealisasi sebesar Rp. 659.467.934,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,74% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
7. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan pagu dana sebesar Rp. 360.000.000,- terealisasi sebesar Rp.300.912.173,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 83,59% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional.

4. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 518.858,550- terealisasi sebesar Rp.445.771.511,- dengan persentase sebesar 85,91 %, dan sisa anggaran sebesar Rp.73.087.039,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 358.497.000,- terealisasi sebesar Rp. 334.843.852,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,40% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 106.493.650,- terealisasi sebesar Rp.69.464.911,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 65,23% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.
3. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp.53.867.900,- terealisasi sebesar Rp.41.462.748,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 76,97 % dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Jumlah Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TUJUAN /SASARAN	**PROGRAM**		**ANGGARAN (Rp)**	**REALISASI (Rp)**	**CAPAIAN (%)**
Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	42.285.846.437	37.040.184.299	87,59
	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	16.407.902.510	12.238.750.824	74,59
	3	Program Pengelolaan Pelayaran	11.653.737.500	10.922.907.960	93,73
	4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	518.858.550	445.771.511	85,91
TOTAL			**70.866.344.997**	**60.647.614.594**	**85,58**

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai media evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dikategorikan Baik**,** dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,78%, serta realisasi anggaran sebesar 85,58%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien, sehingga sebagian besar target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh perencanaan yang semakin baik, penetapan indikator kinerja yang terukur, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta koordinasi yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus disempurnakan, antara lain peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, penguatan analisis capaian kinerja, penyempurnaan target indikator berdasarkan data historis dan target jangka menengah, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan kinerja.

Sebagai upaya penyempurnaan kinerja pada tahun-tahun mendatang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan akan terus

meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyempurnaan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perhubungan. Selain itu, hasil evaluasi kinerja akan dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran pada tahun berikutnya sehingga pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

LKjIP ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perhubungan, serta mendorong terwujudnya sasaran pembangunan transportasi yang mendukung peningkatan konektivitas wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran strategis pada tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja** dengan memastikan keterpaduan antara RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
2. **Menyempurnakan penetapan target indikator kinerja** berdasarkan data historis (data series), kondisi eksisting, serta target jangka menengah dalam Renstra, sehingga target yang

ditetapkan lebih realistis, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi.

3. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan transportasi** melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, operator transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan angkutan umum, keselamatan transportasi, dan kelancaran lalu lintas.
4. **Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja secara berkala**, sehingga setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat segera diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta penyempurnaan kebijakan.
5. **Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur** melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi di bidang perhubungan, perencanaan, penganggaran, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga mampu mendukung pencapaian target kinerja secara optimal.
6. **Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi** dalam proses perencanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan kualitas data, ketepatan waktu pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. **Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya** melalui penetapan prioritas program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome), sehingga setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 872/KPTS/BAPPEDA/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 NOPEMBER 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Kapten A. Rivai No.51 Palembang Kotak Pos No. 1132 Telepon 352005 – 363125
Kode Pos: 30129

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : Skep.44 /000.7 /Dishub /2025

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025 – 2029.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 18140);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubanh dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029

PERTAMA : Menetapkan Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 yaitu "Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas"

KEDUA : Menetapkan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi;
2. Meningkatnya Layanan Transportasi;
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah;

KETIGA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :
1. Rasio Konektivitas Transportasi;
2. V/C Ratio Jalan Provinsi;
3. Rata – Rata Load Factor Angkutan Umum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 - 8 - 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor :

Tanggal :

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi 2. Meningkatnya Layanan Transportasi 3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Rasio Konektivitas Transportasi	*Rasio Konektivitas = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)* • IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi) *Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan*	• Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0,5 • Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan

				angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)	lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30). 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50). 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70). 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).
			V/C Rasio Jalan Provinsi	Volume per Capacity (V/C) Ratio Jalan Provinsi: $\frac{\sum(VC1 + \cdots . + VC88)}{88}$	Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

				Dimana : Volume kendaraan = Jumlah perhitungan kendaraan (emp/smp) pada satu ruas jalan per satuan waktu pengamatan Capacity = C = Co x Fcw x FCsp x FCsf Dimana : C : Kapasitas Co : Kapasitas Dasar FCw : Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas FCsp : Faktor penyesuaian pemisahan arah FCsf : Faktor penyesuaian hambatan samping	Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tentang Penetapan Ruas – Ruas Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 (sebanyak 88 ruas jalan dengan panjang 1.779,27 KM)
			Rata – rata Load Factor Angkutan Umum	Load Factor = Jumlah Penumpang dalam 1 (satu) tahun layanan/ kapasitas daya angkut x 100% LF_{AKDP} = Jumlah Penumpang AKDP dalam 1 (satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% LF_S = Jumlah Penumpang Angkutan Sungai dalam 1(satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100%	Jumlah Penumpang Bus AKDP merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 25 trayek AKDP eksisting Jumlah Penumpang Angkutan Sungai merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 29 lintasan eksisting Jumlah Penumpang Angkutan

				LF_P = Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan dalam 1 (satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% Rata – rata load factor angkutan umum = LF_{AKDP} + LFs + LF_P / jumlah moda Dimana : LF_{AKDP} = Load Factor penumpang AKDP LF_S = Load Factor penumpang angkutan sungai LF_P = Load Factor penumpang angkutan penyeberangan	Penyeberangan merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 1 lintasan eksisting

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Kapten A. Rivai No. 51 Palembang Telepon 352005 363125 Kotak Pos No. 1132
Website : www.sumsel.go.id e-email : webmaster@sumsel.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musni Wijaya, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2026

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Gubernur Sumatera Selatan,	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
H. Herman Deru	Musni Wijaya, S.Sos., M.Si
	Pembina Utama Madya (IV/d)
	NIP. 19690608 199009 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur konektivitas yang berkualitas	V/C Rasio Jalan Provinsi	Rasio	0,388
		Rata rata load factor angkutan umum	%	71,50
2	Meningkatnya Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	Rasio	0,660
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Nilai	82

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 36.836.494.009,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 6.835.384.495,00	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 1.467.290.000,00	APBD
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 192.618.600,00	APBD

Palembang, Januari 2026

Gubernur Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Selatan,

Musni Wijaya., S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690608 199009 1 00

Copyright 2025, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Kapten A. Rivai No. 51 Palembang